



PEMERINTAH KOTA TERNATE

PERATURAN DAERAH TERNATE
NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KOTA TERNATE TAHUN 2005-2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2012



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 39 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2005 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang :

- a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah Kota Ternate secara terencana, terpadu, terarah dan tertib, maka perencanaan pembangunan khususnya rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai salah satu komponen utama perencanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah, perlu disusun suatu perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) sebagai arah dan prioritas pembangunan secara komprehensif untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Ternate;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005 – 2025, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005 – 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 91);
22. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 92);
23. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2005 –
2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Ternate sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional, serta RPJP dan RPJM Provinsi Maluku Utara.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

Pasal 3

- (1) RPJPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak 2005 sampai dengan tahun 2025.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah.
- (3) RPJMD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 02 Februari 2012

WALIKOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 02 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ISNAIN H. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2012 NOMOR 99



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TERNATE TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Kota berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kota Ternate.

RPJPD Kota Ternate sebagai dokumen perencanaan pembangunan kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Ternate (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD Kota Ternate bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi

manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang mandiri, maju, adil dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dan menjadi pedoman di dalam penyusunan RPJMD Kota Ternate.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini dengan pendekatan Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, yang menggambarkan struktur permasalahan yang dihadapi sebagai masukan dan pencapaian hasil pembangunan yang kemudian dianalisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka RPJPD Kota Ternate memuat visi yaitu KOTA TERNATE MANDIRI, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA BERBASIS KEPULAUAN, dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Ternate dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Bagi calon kepala daerah, wajib menyusun materi kampanye yang berisi visi, misi dan program pembangunan daerah berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Kota Ternate dilaksanakan oleh Kepala Bappeda dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD tahun 2010, 2015, 2020 dan 2025, sehingga Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang lebih luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD serta tetap mengacu pada koridor RPJP Kota Ternate.

Pasal 8

Cukup jelas

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Pengertian RPJPD Kota Ternate.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	2
	1.4. Landasan Hukum.....	3
	1.5. Hubungan RPJPD Kota Ternate dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
	1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II	KONDISI DAERAH KOTA TERNATE	8
	2.1. Kondisi Daerah	8
	2.1.1. Kondisi Geografis	8
	2.1.2. Perekonomian Daerah	11
	2.1.3. Sosial Budaya Daerah.....	23
	2.1.4. Prasarana dan Sarana (Infrastruktur) Daerah	28
	2.1.5. Pemerintahan Umum.....	35
	2.1.6. Wilayah dan Tata Ruang	40
	2.1.7. SDA dan Lingkungan Hidup.....	40
	2.2. Tantangan.....	42
	2.3. Modal Dasar.....	46
	2.4. Capaian 2005-2009.....	48
	2.4.1. Kondisi Geografis	48
	2.4.2. Perekonomian Daerah	50
	2.4.3. Koperasi dan UKM	52
	2.4.4. Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.....	53
	2.4.5. Ketenagakerjaan	53

2.5. Pengelolaan Keuangan Daerah	54
2.5.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	54
2.5.2. Pengelolaan Belanja Daerah.....	57
2.6. Sosial Budaya Daerah	58
2.6.1. Kependudukan.....	58
2.6.2. Pendidikan.....	58
2.6.3. Kesehatan	60
2.6.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	61
2.7. Prasarana dan Sarana (Infrasstruktur) Daerah	62
2.7.1. Jalan Darat	62
2.7.2. Angkutan Perkotaan	62
2.7.3. Terminal	63
2.7.4. Angkutan Penyeberangan.....	63
2.7.5. Angkutan Laut	63
2.7.6. Angkutan Udara	64
2.7.7. Komunikasi dan Telekomunikasi	64
2.7.8. Prasarana Dasar Permukiman.....	64
2.7.9. Energi Listrik.....	65
2.8. Perkembangan Pertanian	65
2.8.1. Ketahanan Pangan	65
2.8.2. Pertanian Tanaman Pangan.....	65
2.8.3. Perkebunan	66
2.8.4. Perikanan dan Kelautan	66
2.8.5. Perternakan.....	67
2.8.6. Kehutanan.....	67
2.9. Pemerintahan Umum	67
2.10. Wilayah dan Tata Ruang	71
2.11. SDA dan Lingkungan Hidup	72

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TERNATE	
2005-2025	74
3.1. Visi Kota Ternate	74
3.2. Misi Kota Ternate.....	75
BAB IV SASARAN POKOK, ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN, DAN	
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TERNATE	
2005-2025	77
4.1. Sasaran Pokok Pembangunan.....	77
A. Misi 1	77
B. Misi 2	77
C. Misi 3	78
D. Misi 4	78
E. Misi 5	78
4.2. Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Panjang Daerah	79
A. Misi 1	79
B. Misi 2	80
C. Misi 3	80
D. Misi 4	82
E. Misi 5	83
4.3. Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah	83
4.3.1. RPJMD I (2005 – 2010)	84
4.3.2. RPJMD II (2010 – 2015).....	94
4.3.3. RPJMD III (2015 – 2020).....	95
4.3.4. RPJMD IV (2020 – 2025)	96
BAB V PENUTUP	97

BAB I

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Ternate yang semula berstatus Kota Administratif secara yuridis telah ditingkatkan menjadi Kota sejak dikeluarkannya Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Ternate pada tanggal 27 April 1999. Aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan di Kota Ternate pada awal pembentukannya, secara administratif dibagi menjadi 3 Kecamatan dan terdiri dari 58 Desa/Kelurahan. Dinamika pelaksanaan pembangunan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat telah membawa perubahan yang ditandai perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan pertimbangan rentang kendali pemerintahan, wilayah tertentu di mana perkembangannya dipandang memungkinkan untuk ditingkatkan status kelurahan dan pemekaran kecamatan, sehingga sejak tahun 2010 Pemerintah Kota Ternate terdiri dari 77 Kelurahan dan 7 Kecamatan.

Prakarsa pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dilandasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam Undang-Undang tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), dan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan disusun untuk mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan yaitu "INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR". Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Berdasarkan kebutuhan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Ternate menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 2005-2025 yang diarahkan untuk mencapai tujuan daerah dan nasional 20 (dua puluh) tahun mendatang.

1.2. Pengertian RPJPD Kota Ternate

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ternate adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Ternate yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Ternate dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai tahun 2005 sampai tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen RPJPD dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan

menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk:

1. Menyediakan dokumen perencanaan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pemerintah Kota Ternate dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
4. Memberikan pedoman bagi calon Walikota dalam menyusun visi, misi sehingga pembangunan di Kota Ternate dapat lebih berkelanjutan.
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Arah dan Program Kepala Daerah terpilih.
6. Memberikan Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
7. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

1.4. Landasan Hukum

Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Ternate disusun atas dasar :

1. Landasan Idiil Pancasila;
2. Landasan Konstitusional UUD 1945;
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- k. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.5. Hubungan RPJPD Kota Ternate dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan RPJPD Kota Ternate tidak berdiri sendiri secara utuh, namun terdapat beberapa dokumen lain yang sifatnya menerjemahkan dibawahnya, ataupun secara dimensi berbeda. Berikut beberapa keterangan mengenai kedudukan RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang daerah Kota Ternate:

1. RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 merupakan pedoman umum bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat di Kota Ternate dalam melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun 2005-2025. RPJPD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kota Ternate dengan tetap memperhatikan arah RPJP Nasional dan Propinsi, dan selanjutnya berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di Kota Ternate.
2. Dokumen RPJPD Kota Ternate disusun dengan memperhatikan konsistensi dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJP Provinsi Maluku Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW Kota Ternate. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan RPJPD Kota Ternate dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu, baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.
3. Dokumen RTRW Nasional memberikan gambaran struktur ruang nasional, dengan Kota Ternate ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Penetapan PKW tersebut didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; (2) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau (c)

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

4. Draft RTRW Kota Ternate 2011 – 2031 memberikan arahan Pembagian Wilayah Kota terdiri dari, meliputi:

Dalam penentuan Bagian Wilayah Kota (BWK) telah dilakukan analisis dimana terdapat 7 BWK, yang kesemuanya memiliki peran dan fungsi secara proporsional terhadap wilayah dalam masing-masing BWK.

- 1). BWK – I sebagai kawasan pendukung kegiatan pusat kota memiliki Pusat BWK di kelurahan Dufa-Dufa. BWK – I Kecamatan Ternate Utara meliputi wilayah administrasi Kelurahan Tarau, Sango, Tabam, Tafure, Akehuda, Tubo, Dufa-Dufa, Sangadji Utara, Sangadji, Toboleu, Kasturian, Salero, Soa-Sio, dan Soa. BWK - I memiliki luas wilayah daratan 1.913,90 ha merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan tinggi.

Fungsi dan arah pengembangan di BWK – I meliputi :

- Permukiman,
 - Bandara,
 - Pelabuhan,
 - Pariwisata,
 - Militer,
 - Jasa,
 - Perdagangan,
 - Perikanan,
 - Pertanian,
 - Pendidikan,
 - Olah Raga,
 - Industri Kecil dan Ringan, dan
 - Peternakan.
- 2). BWK – II sebagai pusat kota dengan memiliki Pusat BWK di Kelurahan Salahuddin. BWK – II Kecamatan Ternate Tengah meliputi wilayah administrasi Kelurahan Makassar Timur, Makassar Barat, Salahuddin, Kalumpang, Santiong, Gamalama, Moya, Kampung Pisang, Marikurubu, Muhajirin, Tanah raja, Maliaro, Stadion, Takoma, dan Kota Baru. BWK – II

memiliki luas wilayah daratan 1.196,60 ha merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan tinggi.

Fungsi dan arah pengembangan di BWK – II meliputi :

- Jasa,
 - Perdagangan,
 - Pariwisata,
 - Pelabuhan,
 - Permukiman,
 - Pendidikan,
 - Pemerintahan,
 - Militer,
 - Pertanian,
 - Peternakan,
 - Olah Raga dan
 - Industri Kecil.
- 3) BWK – III sebagai kawasan pendukung kegiatan pusat kota memiliki Pusat BWK di Kelurahan Kalumata. BWK – III Kecamatan Ternate Selatan meliputi wilayah administrasi Kelurahan Sasa, Gambesi, Ngade, Fitu, Kalumata, Kayu Merah, Tabona, Ubo-Ubo, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua Utara, Mangga Dua, Jati Perumnas, Jati, Tanah Tinggi Barat, Tanah Tinggi, dan Toboko. BWK – III memiliki luas wilayah daratan 2.100,20 ha merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan tinggi.

Fungsi dan arah pengembangan di BWK – III meliputi :

- Permukiman,
- Jasa,
- Perdagangan,
- Pariwisata,
- Pelabuhan,
- Perikanan,
- Pertanian,
- Militer,
- Olah Raga,
- Pendidikan,

- Industri Kecil dan Ringan, dan
 - Peternakan.
- 4). BWK – IV sebagai kawasan pendukung kegiatan pusat kota memiliki Pusat BWK di Kelurahan Jambula. BWK – IV Kecamatan Pulau Ternate meliputi wilayah administrasi Kelurahan Jambula, Kastela, Foramadiah, Rua, Afe Taduma, Dorpedu, Togafo, Loto, Takome, Sulamadaha, Tobololo, Bula dan Kulaba. BWK – IV memiliki luas daratan 4.946,60 ha merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan sedang.

Fungsi dan arah pengembangan di BWK – IV meliputi :

- Permukiman,
 - Pariwisata,
 - Pertanian,
 - Peternakan,
 - Industri Kecil dan Ringan, dan
 - Perikanan.
- 5) BWK – V sebagai kawasan pendukung kegiatan pusat kota memiliki Pusat BWK di Kelurahan Faudu. BWK – IV Kecamatan Pulau Hiri meliputi wilayah administrasi Kelurahan Faudu, Tomajiko, Dodari Isa, Togolobe, Tafraka dan Mado. BWK – V memiliki luas wilayah daratan 670,5 ha merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan sedang.

Fungsi dan arah pengembangan di BWK – V meliputi :

- Permukiman,
 - Perikanan,
 - Pertanian,
 - Peternakan,
 - Pariwisata, dan
 - Industri Kecil.
- 6) BWK – VI sebagai kawasan pendukung kegiatan pusat kota memiliki Pusat BWK di Kelurahan Moti Kota. BWK – VI Kecamatan Pulau Moti meliputi wilayah administrasi Kelurahan Moti Kota, Takofi, Tadenas, Figur, Tafamutu, dan Tafaga. BWK – VI memiliki luas wilayah daratan 2.478,70 ha merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan rendah.

Fungsi dan arah pengembangan di BWK – VI meliputi :

- Permukiman,
 - Pertanian,
 - Perikanan,
 - Pariwisata,
 - Industri Kecil dan Ringan, dan
 - Peternakan.
- 7) BWK – VII sebagai kawasan pendukung kegiatan pusat kota memiliki pusat BWK di Kelurahan Mayau. BWK – VII Kecamatan Batang Dua meliputi wilayah administrasi Kelurahan Mayau, Tifure, Bido, Lelewi, Perum Bersatu dan Pante Sagu. BWK – VII memiliki luas wilayah daratan 2.900,40 ha merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan rendah.

Fungsi dan arah pengembangan di BWK – VII meliputi :

- Permukiman,
 - Pertanian,
 - Perikanan,
 - Pariwisata,
 - Industri Kecil dan Ringan, dan
 - Peternakan.
5. Dokumen RPJPD Kota Ternate dijabarkan ke dalam dokumen yang lebih operasional, yakni dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Lebih lanjut, secara horizontal RPJPD tersinkronisasi dengan dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya pada tingkat yang setara. Dokumen RPJM selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi RENSTRA SKPD.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun RPJPD untuk 20 tahun ke depan yang diarahkan untuk ikut mencapai tujuan nasional. Dalam rangka ikut mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut khususnya bagi masyarakat Kota Ternate, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Ternate Tahun 2005 – 2025.

1.6. Sistematika Penulisan

RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
Berisikan penjelasan latar belakang, pengertian RPJPD Kota Ternate, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJPD dengan dokumen pembangunan lainnya dan sistematika penulisan.
- Bab II Kondisi Daerah Kota Ternate
Berisikan penjelasan terkait dengan kondisi sosial dan budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana yang terdapat di Kota Ternate.
- Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025
Berisikan pernyataan visi dan misi pembangunan daerah Kota Ternate.
- Bab IV Sasaran Pokok, Arah Kebijakan, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025
Berisikan pernyataan Sasaran Pokok, Arah Kebijakan, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Ternate.
- Bab V Penutup
Berisikan pernyataan kegunaan dan keberhasilan dokumen RPJPD Kota Ternate.

BAB II

KONDISI DAERAH KOTA TERNATE

2.1. Kondisi Daerah

Aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan di Kota Ternate pada awal pembentukannya, secara administratif dibagi menjadi 3 Kecamatan dan terdiri dari 58 Desa/Kelurahan. Dinamika pelaksanaan pembangunan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat telah membawa perubahan yang ditandai perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan pertimbangan rentang kendali pemerintahan, wilayah tertentu di mana perkembangannya dipandang memungkinkan untuk ditingkatkan status administrasinya seperti Pulau Moti, misalnya, perlu ditempuh langkah kebijakan untuk direalisasikan. Terkait dengan itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Moti yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Sebagai konsekuensi pelaksanaan Perda dimaksud, 4 (empat) Desa yang ada di Pulau Moti dimekarkan dan ditingkatkan statusnya menjadi 6 (enam) Kelurahan.

Perkembangan lain yang dicapai dari segi administrasi pemerintahan adalah dimekarkannya 2 (dua) Kelurahan di Pulau Batang Dua Kecamatan Pulau Ternate menjadi 5 (lima) Kelurahan, melalui Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan Lelewi, Bido dan Pante Sagu.

Dengan ditingkatkan statusnya sebagai kota otonom, Kota Ternate memiliki 4 Kecamatan, yaitu Ternate Utara, Ternate Selatan, Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti dan terdiri atas 63 Kelurahan, seperti uraian berikut :

Tabel 2.1
Administrasi Wilayah Kota Ternate

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ibu Kota
1	Ternate Utara	17	Dufa-dufa
2	Ternate Selatan	19	Kalumata
3	Pulau Ternate	21	Jambula
4	M o t i	6	Moti Kota
J u m l a h		63	

Sumber : BPS Kota Ternate, 2004

2.1.1 Kondisi Geografis

1) Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

Luas wilayah Kota Ternate 5.795,4 Km², terdiri dari luas perairan 5.544,55 Km² dan luas daratan 250,85 Km². Adapun luas wilayah Kecamatan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Luas/Km ²		
		Darat Kelurahan	Laut	Jumlah
1	Ternate Utara	24,575	15,70	40,275
2	Ternate Selatan	31,875	62,10	93,975
3	Pulau Ternate	169,80	5.262,75	5.432,55
4	M o t i	24,60	204	228,60
T o t a l		250,850	5.544,55	5.795,40

Sumber : BPS Kota Ternate, 2004

Wilayah Kota Ternate terletak antara 0°C– 2°C Lintang Utara dan 126°C-128°C Bujur Timur, Kota Ternate berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku

- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku
- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera, dan
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku

Dari total luas wilayah Kota Ternate 5.795,4 Km², dengan rincian Kecamatan Pulau Ternate dengan luas wilayah 5.432,55 Km², Kecamatan Pulau Moti 228,6 Km², Kecamatan Ternate Selatan 93,975 Km², dan Kecamatan Ternate Utara dengan luas wilayah 40,275 Km².

Kota Ternate adalah Kota Kepulauan dan terdiri dari 8 pulau, meliputi:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Pulau Ternate | 5. Pulau Tifure |
| 2. Pulau Hiri | 6. Pulau Gurida |
| 3. Pulau Moti | 7. Pulau Maka |
| 4. Pulau Mayau | 8. Pulau Mano |

Batas-batas wilayah kecamatan sebagai berikut :

Batas-batas wilayah Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Pulau Ternate
- Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Ternate Selatan
- Sebelah Timur : Laut Halmahera
- Sebelah Barat : Gunung Gamalama

Batas-batas wilayah Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Ternate Utara
- Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Pulau Ternate
- Sebelah Timur : Laut Maluku
- Sebelah Barat : Gunung Gamalama

Batas-batas wilayah Kecamatan Pulau Ternate, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Jailolo
- Sebelah Selatan : Pulau Makian
- Sebelah Timur : Pulau Halmahera
- Sebelah Barat : Laut Maluku

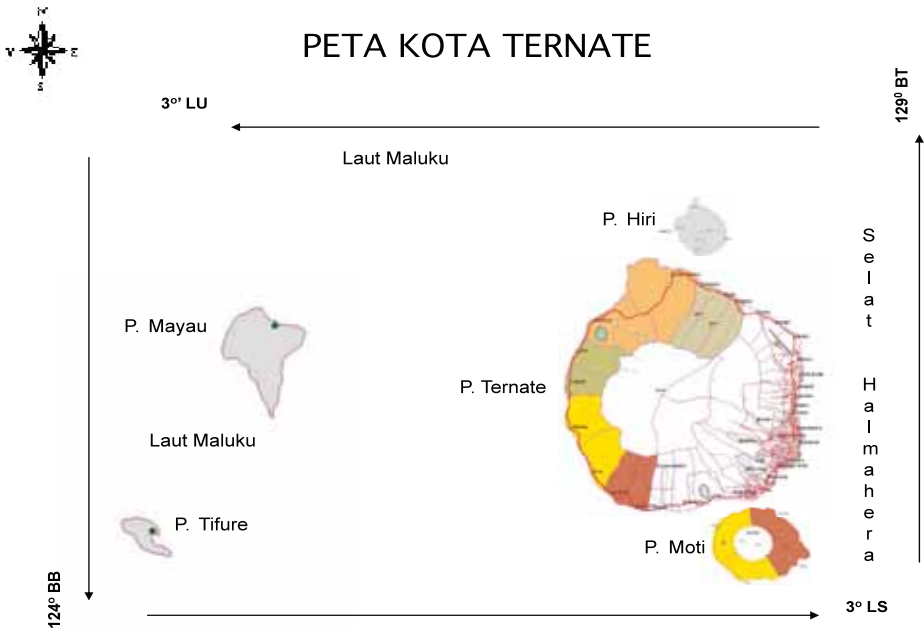
Batas-batas wilayah Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pulau Mare
- Sebelah Selatan : Pulau Makian
- Sebelah Timur : Pulau Halmahera
- Sebelah Barat : Laut Maluku

Total luas daratan adalah 250.85 Km² dan luas lautan adalah 5.544,55 Km². Adapun jarak antara pulau-pulau tersebut dengan pulau Ternate adalah sebagai berikut :

1. Ternate – Hiri : 1,5 ML
2. Ternate – Moti : 16,0 ML
3. Ternate – Maka : 1,6 ML
4. Ternate – Mano : 1,6 ML
5. Ternate – Mayau : 90,0 ML
6. Ternate – Tifure : 106,0 ML
7. Ternate – Gurida : 106,1 ML

Gambar 2.1 : Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate



2) Topografi

Kondisi topografi lahan Kepulauan Ternate adalah berbukit-bukit dengan sebuah gunung berapi yang masih aktif dan terletak ditengah Pulau Ternate. Permukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai kepulauan. Dari 5 (lima) pulau besar yang ada, umumnya masyarakat mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh di sekitar perairan pantai. Pulau Ternate memiliki ketererangan fisik terbesar di atas 40% yang mengerucut ke arah pucak Gunung Gamalama, terletak di tengah-tengah pulau.

Di daerah pesisir rata-rata kemiringan adalah sekitar 2% - 8%. Jenis tanah mayoritas adalah *tanah Rogusal* di Pulau Ternate, Pulau Moti dan Pulau Hiri. Sedangkan jenis *tanah Rensika* ada di Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida. Kondisi tersebut merupakan ciri tanah pulau vulkanis dan pulau karang. Kedalaman laut adalah bervariasi, pada beberapa lokasi di sekitar Pulau Ternate, terdapat tingkat kedalaman yang tidak terlalu dalam, sekitar 10 m sampai pada jarak sekitar 100 m dari garis pantai, sehingga memungkinkan adanya peluang reklamasi. Tetapi pada bagian lain terdapat tingkat kedalaman yang cukup besar dan berjarak tidak jauh dari garis pantai yang ada.

3) Kondisi Iklim

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara yang didominasi wilayah laut, Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis yang terdiri dari dua musim (*Utara-Barat* dan *Timur-Selatan*) yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keragaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah : 0-499 M, Sedang : 500-699 M, dan Tinggi : lebih dari 700 M). Dengan kondisi tersebut, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 pulau, dimana 5 pulau yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan pulau Tifure didiami penduduk, sedangkan untuk 3 pulau kecil yaitu pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida, tidak berpenghuni.

2.1.2 Perekonomian Daerah

Setelah mengalami masa keterpurukan sebagai dampak dari konflik horisontal yang melanda wilayah ini pada tahun 2000, perekonomian Kota Ternate mulai menunjukkan adanya pemulihan pada tahun 2001.

Perkembangan kondisi pemulihan perekonomian tersebut terus berlangsung dan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang positif hingga tahun 2004. Pada saat konflik tahun 2000 pertumbuhan negatif (-0,93) persen, tahun 2004 telah mencapai 6,05 persen. Perkembangan perekonomian Kota Ternate pada tahun 2000-2004 seperti yang ditunjukkan melalui beberapa indikator ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun juga ditunjukkan dengan peningkatan indikator bidang sosial sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan penduduk antara lain aspek pendidikan dan kesehatan.

1) Produk Domestik Regional Bruto Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu. Dalam penyajiannya, PDRB dibedakan atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil, tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat struktur perekonomian suatu wilayah. Pada tahun 2000 PDRB Kota Ternate atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 340.195 juta rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 199.683 juta rupiah, terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya (1999) sebesar 0,89 persen untuk harga berlaku dan 0,93 persen untuk harga konstan. Penurunan ini tidak terlepas dari terjadinya konflik di daerah ini yang menyebabkan melemahnya kegiatan di hampir semua sektor ekonomi.

Selama periode tahun 2001-2004 semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif sehingga angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan antara lain karena makin kondusifnya situasi keamanan di wilayah ini pasca konflik horisontal dan

juga membaiknya kondisi perekonomian nasional setelah sempat mengalami krisis moneter tahun 1997. Lebih jelas mengenai perkembangan PDRB Kota Ternate dari tahun 2000-2004 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Perkembangan PDRB Kota Ternate Tahun 2000-2004 (Juta Rupiah)

No	PDRB	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2000	340.195	199.683
2001	354.306	205.343
2002	368.358	211.874
2003	398.648	222.332
2004	429.402	235.776

Sumber: BPS Kota Ternate, 2005

Salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian di suatu daerah/wilayah adalah dengan mencermati angka pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2000 perekonomian Kota Ternate mengalami pertumbuhan negatif sebesar (-0.93) persen, hampir semua sektor perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, hal ini disebabkan karena konflik horisontal yang terjadi di daerah ini secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Ternate.

Membaiknya situasi pasca konflik menyebabkan perekonomian di Kota Ternate pada tahun 2001 kembali menjadi normal yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,83 persen. Peningkatan kinerja ekonomi pada tahun 2001 terus berlanjut pada tahun berikutnya, ini terlihat dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi menjadi 3,18 persen pada tahun 2002 dan 4,94 persen pada tahun 2003 serta 6,05 persen pada tahun 2004. Secara umum stabilitas perekonomian Kota Ternate selama kurun waktu 2000-2004 menunjukkan kecenderungan perkembangan yang positif seperti terlihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate Tahun 2000-2004

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Jumlah (Juta Rupiah)	Persentase Pertumbuhan (%)
2000	199.683	-0,93
2001	205.343	2,83
2002	211.874	3,18
2003	222.332	4,94
2004	235.776	6,05

Sumber : BPS Kota Ternate, 2005

Di samping itu juga dapat dilihat perkembangan struktur ekonomi di Kota Ternate berdasarkan distribusi PDRB menurut sektor atas dasar harga berlaku. Sejak tahun 2000 perekonomian Kota Ternate didominasi oleh tiga sektor utama yaitu perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa serta pengangkutan dan komunikasi. Kontribusi ketiga sektor tersebut melebihi 50 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Ternate, selama kurun waktu lima tahun terakhir (2000-2004) rata-rata memberikan andil sebesar 32,32 persen pertahun. Besarnya kontribusi sektor ini dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran, hal ini dapat dimaklumi karena Kota Ternate merupakan kota yang sejak dulu dikenal sebagai kota perdagangan.

Sementara itu sektor jasa serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang menempati urutan kedua dan ketiga dalam pembentukan PDRB Kota Ternate rata-rata memberikan kontribusi masing-masing sebesar 19,06 persen serta 14,25 persen pertahun. Selengkapnya mengenai kontribusi masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 2.5.

PDRB perkapita penduduk Kota Ternate atas dasar harga berlaku pada tahun 2000 adalah sebesar Rp. 2.080.123 atau sekitar Rp. 173.343 dalam setiap bulannya. Angka ini mengalami penurunan sebesar 31.45 persen dibanding tahun 1999. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya nilai PDRB serta bertambahnya jumlah

Tabel 2.5
Struktur Perekonomian Kota Ternate Tahun 2000-2004 (Persen)

No	Sektor	Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Pertanian	13,72	13,98	13,72	13,51	13,34
2	Pertambangan & Penggalian	1,06	1,05	1,01	0,95	0,90
3	Industri	7,18	6,96	6,75	6,35	6,26
4	Listrik, Gas & Air Bersih	1,56	1,53	1,62	1,61	1,57
5	Bangunan	2,98	3,86	4,16	4,44	4,98
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	32,65	31,98	32,19	32,24	32,55
7	Pengangkutan & Komunikasi	14,30	14,34	14,51	14,35	13,77
8	Keuangan, Persewaan & Jasa perusahaan	7,68	7,64	7,46	7,11	6,87
9	Jasa-jasa	18,88	18,67	18,57	19,44	19,76

Sumber : BPS Kota Ternate, 2005

penduduk Kota Ternate akibat arus pengungsi yang masuk ke Kota Ternate. Namun pada tahun berikutnya angka ini selalu menunjukkan peningkatan. Dalam tahun 2001 dan 2002 PDRB perkapita meningkat masing-masing menjadi Rp. 2.094.490 dan Rp. 2.562.026. Selanjutnya pada tahun 2003 PDRB per kapita meningkat menjadi sebesar Rp. 2.726.187 dan Rp. 2.909.584 pada tahun 2004.

Bila ditinjau berdasarkan harga konstan 1993, PDRB perkapita selama kurun waktu 2000 sampai 2004 pernah mengalami penurunan pada tahun 2000 dan 2001, masing-masing sebesar 31,47 persen dan 0,63 persen. Hal ini terutama disebabkan terjadinya konflik di daerah ini. Memasuki tahun 2002 pertumbuhan PDRB perkapita penduduk Kota Ternate meningkat cukup signifikan menjadi Rp. 1.473.640 atau naik sebesar 21,40 persen. Peningkatan PDRB perkapita tahun 2002 disebabkan karena pada tahun tersebut produksi dan harga beberapa komoditi pertanian, khususnya sub sektor perkebunan meningkat sehingga memberikan efek pendapatan bagi masyarakat. Pertumbuhan PDRB perkapita tersebut terus meningkat menjadi Rp. 1.520.435 atau sebesar 3,18 persen pada tahun 2003 dan Rp. 1.597.590 pada tahun 2004, keadaan ini dapat diartikan terjadinya peningkatan pendapatan penduduk.

Tabel 2.6
Perkembangan PDRB Perkapita Kota Ternate Tahun 2000-2004

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	Nilai (Rupiah)	Perubahan	Nilai (Rupiah)	Perubahan
2000	2.081.123	-31,45	1.221.549	-31,47
2001	2.094.490	0,64	1.213.889	-0,63
2002	2.562.026	22,32	1.473.640	21,40
2003	2.726.187	6,41	1.520.436	3,18
2004	2.909.584	6,73	1.597.590	5,07

Sumber : BPS Kota Ternate, 2005

2) Tingkat Inflasi

Prediksi laju inflasi di Kota Ternate setiap tahunnya untuk 5 (lima) tahun ke depan (2006-2010) mengalami penurunan yang positif dan berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Ternate, sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Prediksi Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate Tahun 2006-2010

No	Tahun	Laju Inflasi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2006	5,69	6,80
2	2007	5,49	7,51
3	2008	5,22	8,23
4	2009	4,97	8,95
5	2010	4,75	9,67

Sumber : BPS Kota Ternate, 2005

3) Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD. Penerimaan dari sektor Pajak

mengalami peningkatan yang cukup berarti setiap tahun. Pada Tahun Anggaran 2000-2004, penerimaan pajak telah memberikan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 38,60% per tahun dengan pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar 73,99% per tahun. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Ternate terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran yang merupakan salah satu Pajak Daerah yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar dengan prosentase rata-rata 3,51% per tahun terhadap PAD dengan tingkat pertumbuhan realisasi rata-rata 84,86% per tahun. Walaupun Realisasi pada Tahun Anggaran 2000 tidak mencapai target (hanya sebesar 43,52%) karena dipengaruhi oleh kondisi Kota Ternate yang pada saat itu dilanda kerusuhan horisontal. Namun sejak tahun anggaran 2001-2004 realisasi pajak hotel dan restoran selalu mencapai target yang ditetapkan. Dan untuk tahun 2005 pajak hotel dan restoran sudah dibagi menjadi 2 (dua) pos penerimaan yang berbeda yaitu pajak hotel dan pajak restoran sesuai isyarat dari UU Nomor 34 tahun 2000.

Tabel 2.8
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2000–2005

No	Tahun	Target	Realisasi	Prosentase	Pertumbuhan	
	Anggaran	(Rp)	(Rp)	Realisasi %	Target %	Realisasi %
1	2000 *)	526.627.250	494.240.539	93,85	0,00	0,00
2	2001	1.050.777.000	1.250.600.365	119,02	99,53	153,03
3	2002	1.667.200.000	2.190.830.214	131,41	58,66	75,18
4	2003	2.362.000.000	3.063.971.795	129,72	41,67	39,85
5	2004	3.412.000.000	3.919.208.258	114,87	44,45	27,91
6	2005	3.815.000.000			11,81	

* Target dan Realisasi (9 bulan)

Sumber : BPKD Kota Ternate, 2005

Pajak Reklame juga memberikan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 2,59% pada periode tahun anggaran 2000 s/d 2004 dengan tingkat pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar 65,00% pertahun. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang merupakan salah satu sumber penerimaan dari sektor Pajak yang dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu rata-rata sebesar 22,61% pertahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 70,88% pertahun.

Meningkatnya Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2000 sebesar Rp. 304.628.225,- menjadi Rp. 2.310.555.975,- pada tahun 2004, disebabkan meningkatnya pemakaian tenaga listrik oleh masyarakat.

Di samping Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, terdapat juga Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang pada tahun Anggaran 2000 Realisasinya mencapai Rp. 98.869.763,- dan pada tahun Anggaran 2004 Realisasi Penerimaannya telah mencapai Rp. 971.046.144,- penerimaan ini mengalami pertumbuhan Realisasi rata-rata sebesar 86,94% pertahun dengan kontribusinya terhadap PAD rata-rata sebesar 9,27%.

Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sejak tahun 2000-2001 merupakan Pajak Daerah Kota Ternate dengan realisasi penerimaan pada tahun 2000 mencapai Rp. 5.570.400,- atau 22,28% dari target yang ditetapkan dan pada tahun 2001 realisasinya mencapai 103,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,-, namun dengan adanya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, maka Pajak tersebut menjadi Pajak Provinsi dimana Pemerintah Kota Ternate hanya memperoleh Bagi Hasil dari penerimaan Pajak tersebut.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2000-2004, memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan penerimaan PAD dengan Realisasi rata-rata mencapai Rp. 2.158.103.462,- pertahun dan mampu memberikan kontribusi rata-rata terhadap PAD sebesar 40,04% pertahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 66,10% pertahun. Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kota Ternate antara lain : Retribusi Pasar, yang merupakan salah satu jenis penerimaan dari pos Retribusi dan memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan PAD yakni rata-rata mencapai 11,59% pertahun dengan tingkat Pertumbuhan Realisasi sebesar 35,84% pertahun.

Walaupun dengan target yang meningkat dari tahun ke tahun, namun realisasi Retribusi Pasar selalu melampaui target, kecuali pada tahun Anggaran 2000 karena kondisi Kota Ternate yang kurang stabil. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang juga merupakan salah satu jenis retribusi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan PAD dari Tahun Anggaran 2000-

2004 dengan Pertumbuhan Realisasi rata-rata 53,92% pertahun dan kontribusinya terhadap PAD mencapai rata-rata 5,57% pertahun. Walaupun realisasi pada tahun anggaran 2000 tidak mencapai target (sebesar 91,24%), namun sejak tahun Anggaran 2001-2004 realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan selalu melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 2.9
Rekapitulasi Target Dan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2000-2005

No	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Propsentase Realisasi %	Pertumbuhan	
					Target %	Realisasi %
1	2000 *)	770.872.750	577.780.217	74,95	0,00	0,00
2	2001	1.218.680.000	1.350.064.978	110,78	58,09	133,66
3	2002	2.053.500.000	2.336.790.164	113,80	68,50	73,09
4	2003	2.611.000.000	2.691.401.309	103,08	27,15	15,18
5	2004	3.607.000.000	3.834.480.644	106,31	38,15	42,47
6	2005	4.098.000.000			13,61	

* Target dan Realisasi (9 bulan)

Sumber : BPKD Kota Ternate, 2005

Retribusi Pelayanan Kesehatan sejak tahun Anggaran 2000-2004 telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dengan target dan realisasi yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap PAD mencapai rata-rata sebesar 2,37% pertahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 134,55% pertahun. Hal ini dapat dilihat dari Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp. 15.498.323,- dan menjadi sebesar Rp. 306.388.180,- pada Tahun Anggaran 2004.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan juga merupakan salah satu jenis Retribusi yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan PAD. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi rata-rata sebesar 4,18% pertahun dengan tingkat pertumbuhan realisasi rata-rata 65,27% pertahun. Realisasi Retribusi Terminal pada Tahun Anggaran 2000 baru mencapai Rp. 72.374.800,- namun pada akhir tahun anggaran 2004 realisasinya sudah mencapai Rp. 223.619.000,- dengan

demikian dapat dihitung besarnya kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 3,65% pertahun dengan tingkat pertumbuhannya rata-rata 37,23% pertahun.

Demikian halnya dengan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil pada Tahun Anggaran 2000-2004 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 2,10% pertahun dan 2,72% pertahun, sedangkan tingkat pertumbuhan Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran mencapai rata-rata 94,59% pertahun dan pertumbuhan Realisasi Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil rata-rata sebesar 131,43% pertahun.

Di samping retribusi tersebut di atas, juga ada beberapa jenis retribusi yang turut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD antara lain; Retribusi Parkir, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek dan beberapa Retribusi baru seperti Retribusi Izin Tempat Usaha dan lain-lain yang cukup berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

4) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah Penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang berbentuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Dana Perimbangan juga merupakan salah

Tabel 2.10
Rekapitulasi Target Dan Realisasi Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2000-2005

No	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Propsentase Realisasi %	Pertumbuhan	
					Target %	Realisasi %
1	2000 *)	39.559.115.500	25.416.726.474	64,25	0,00	0,00
2	2001	101.949.589.000	112.187.710.869	110,04	157,71	341,39
3	2002	136.380.000.000	149.179.221.170	109,38	33,77	32,97
4	2003	146.455.000.000	158.124.334.779	107,97	7,39	6,00
5	2004	159.296.000.000	167.254.389.688	105,00	8,77	5,77
6	2005	173.744.000.000			9,07	

* Target dan Realisasi (9 bulan)

Sumber : BPKD Kota Ternate, 2005

satu komponen penerimaan Pendapatan Daerah yang besar dengan kontribusi rata-rata sebesar 90,85% pertahun terhadap Pendapatan Daerah dengan Pertumbuhan Realisasi rata-rata sebesar 96,53% pertahun pada periode tahun Anggaran 2001-2004 dan pada Tahun 2005 Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 173.744.000.000,-.

Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 telah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 19,34% pertahun terhadap total penerimaan dari Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2001-2004 dengan tingkat Pertumbuhan Realisasi rata-rata sebesar 129,66% pertahun.

Penerimaan Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari PBB telah memberikan kontribusi terhadap Dana Perimbangan rata-rata sebesar 6,91% pertahun dengan tingkat Pertumbuhan rata-rata sebesar 108,08% pertahun menyusul BPHTB yang memberikan kontribusi hanya sebesar 0,68% pertahun dengan Pertumbuhan rata-rata mencapai 1.147,10% pertahun untuk Tahun Anggaran 2000-2004.

Realisasi PPh Pasal 21 pada Tahun Anggaran 2001-2004 rata-rata sebesar Rp. 1.571.767.190,- pertahun dengan Pertumbuhan rata-rata sebesar 75,81% pertahun sedangkan kontribusi terhadap Dana Perimbangan baru mencapai rata-rata sebesar 1,02% pertahun. Penerimaan Dana tersebut diatas berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 dan PP Nomor 155 Tahun 2000.

Khusus Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2002-2004 Pemerintah Kota Ternate selalu mencapai target APBN yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Bagi Hasil Bukan Pajak

Penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) bersumber dari Royalty, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Hasil Perikanan yang penerimaannya baru dimulai pada Tahun Anggaran 2001 dan telah memberikan

kontribusi rata-rata sebesar 5,68% pertahun terhadap Total Dana Perimbangan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 29,97% pertahun. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata penerimaan ke 3 (tiga) Pos tersebut, untuk Tahun Anggaran 2001-2004 yaitu sebesar Rp. 8.328.470.965,- pertahun dan cukup berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Daerah.

Penerimaan Royalti pada tahun Anggaran 2001 mencapai Rp. 5.067.619.804,- Tahun Anggaran 2002 Rp. 5.474.968.260,-. Tahun Anggaran 2003 Rp. 5.309.358.692,- dan pada Tahun Anggaran 2004 menjadi sebesar Rp. 3.192.360.771,-.

Penerimaan Dana PSDH pada tahun Anggaran 2001 baru mencapai Rp. 48.809.673,- pada tahun Anggaran 2002 mencapai Rp. 7.766.970.080,- tahun 2003 mencapai Rp. 3.460.072.100,- dan pada tahun Anggaran 2004 Realisasinya menjadi sebesar Rp. 1.580.635.526,-.

Penerimaan Hasil Perikanan pada tahun Anggaran 2002 belum dianggarkan dalam APBD namun terdapat realisasi sebesar Rp. 261.387.756,- pada Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 622.670.876,- dan pada Tahun Anggaran 2004 Realisasinya menjadi sebesar Rp. 529.030.323,-. Jika dilihat dari perkembangan realisasi, maka penerimaan pos Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2003 dan 2004 mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya pemekaran daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara, sehingga bagian dari pos tersebut menjadi berkurang.

Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi

Pos ini merupakan bagian dari Dana Perimbangan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan bersumber dari Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

PBBKB yang sudah dianggarkan sejak periode Tahun Anggaran 2000-2004 telah memberikan kontribusi terhadap Dana Perimbangan rata-rata sebesar 1,25% pertahun dan terhadap Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 1,16% pertahun dengan tingkat pertumbuhan Realisasi mencapai rata-rata 383,58% pertahun.

Tabel 2.11
Rekapitulasi Target dan Realisasi bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan
dari Provinsi Tahun Anggaran 2000-2005

No	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Proporsentase Realisasi %	Pertumbuhan	
					Target %	Realisasi %
1	2000 *)	500.000.000	881.749.104	176,35	-	-
2	2001	500.000.000	1.008.207.707	201,64	-	14,34
3	2002	786.000.000	1.721.039.732	218,96	57,20	70,70
4	2003	1.467.000.000	1.094.467.035	74,617	86,64	(-36,41)
5	2004	1.957.000.000	3.190.149.880	163,01	33,40	191,48
6	2005	1.957.000.000			0,00	

* Target dan Realisasi (9 bulan)

Sumber : BPKD Kota Ternate, 2005

PKB yang baru dianggarkan pada Tahun Anggaran 2002, namun telah memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap Dana Perimbangan yaitu rata-rata sebesar 0,20% pertahun dengan tingkat Pertumbuhan Realisasi selama 3 (tiga) tahun rata-rata sebesar 83,82% pertahun. Sama halnya dengan PKB, BBNKB juga merupakan jenis Penerimaan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan baru dianggarkan pada Tahun Anggaran 2002, namun telah memberikan kontribusi terhadap Dana Perimbangan rata-rata sebesar 0,35% pertahun dengan Pertumbuhan Realisasi rata-rata sebesar 77,32% pertahun.

Sedangkan untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, sampai dengan Tahun Anggaran 2002 adalah merupakan salah satu jenis Penerimaan PAD, namun setelah adanya Undang-undang No. 34 Tahun 2000 jenis penerimaan ini dikategorikan sebagai Pajak Daerah yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi dan sampai dengan Tahun Anggaran 2004 belum menerima Bagi Hasil dari Provinsi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah Penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang baru dimulai pada Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 92.846.896.000,- dan pada tahun 2004 telah mencapai Rp. 126.042.000.000,-. Sumber Pendapatan ini memberikan kontribusi terbesar terhadap Total Pendapatan Daerah rata-rata

sebesar 71,25% per tahun dengan tingkat Pertumbuhan rata-rata sebesar 11,60% per tahun.

Tabel 2.12
Rekapitulasi Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Proporsentase Realisasi %	Pertumbuhan	
					Target %	Realisasi %
1	2000 *)	-	-	-	-	-
2	2001	92.846.896.000	92.846.896.000	100,00	0,00	0,00
3	2002	122.220.000.000	122.220.000.000	100,00	31,64	31,64
4	2003	121.410.000.000	121.410.000.000	100,00	(-0,66)	(-0,66)
5	2004	126.042.000.000	126.042.000.000	100,00	3,82	3,82
6	2005	137.417.000.000			9,02	

* Target dan Realisasi (9 bulan)

Sumber : BPKD Kota Ternate, 2005

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sejak Tahun Anggaran 2001-2004, Pemerintah Kota Ternate telah merealisasikan Dana Alokasi Khusus rata-rata mencapai Rp. 5.591.013.250,- dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 3,30% dengan tingkat Pertumbuhan rata-rata sebesar 163,79% pertahun.

Tabel 2.13
Rekapitulasi Target Dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun Anggaran 2000-2005

No	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Proporsentase Realisasi %	Pertumbuhan	
					Target %	Realisasi %
1	2000 *)	-	-	-	-	-
2	2001	-	2.600.500.000	-	-	-
3	2002	-	1.450.000.000	-	-	(-44,24)
4	2003	8.800.000.000	9.243.533.000	105,04	3,07	537,49
5	2004	9.070.000.000	9.070.000.000	100,00	2,98	(-1,88)
6	2005	13.160.000.000			45,09	

* Target dan Realisasi (9 bulan)

Sumber : BPKD Kota Ternate, 2005

5) Investasi dan Tabungan Pemerintah Daerah

Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu, merupakan akumulasi kelebihan atas realisasi penerimaan dan adanya efisiensi yang dilakukan pada semua sektor. Penerimaan ini telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 6.53% pertahun dari Total Pendapatan Daerah. Besar-kecilnya Sisa lebih perhitungan ini disebabkan adanya Pelampauan Target Pendapatan Daerah dan Efisiensi terhadap Belanja Daerah.

Oleh karena itu setiap kelebihan sisa lebih perhitungan anggaran dapat menjadi investasi dan tabungan daerah bagi pelaksanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya. Adapun sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2000-2005 dapat dijelaskan dalam Tabel 2.14 berikut :

Tabel 2.14
Rekapitulasi Target dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan
Tahun Anggaran 2000-2005

No	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Propsentase Realisasi %	Pertumbuhan	
					Target %	Realisasi %
1	2000 *)	335.982.692	335.982.692	100,00	-	-
2	2001	295.762.600	295.762.600	100,00	(-11,97)	(-11,97)
3	2002	19.260.370.725	19.260.370.725	100,00	6.412,10	6.412,10
4	2003	18.035.402.378	18.035.402.378	100,00	(-6,36)	(-6,36)
5	2004	18.941.970.309	18.941.970.309	100,00	5,03	5,03
6	2005	8.617.587.000			(-54,51)	

* Target dan Realisasi (9 bulan)

Sumber : BPKD Kota Ternate, 2005

Di samping sisa lebih perhitungan anggaran Pemerintah Daerah Kota Ternate 2000–2005 diatas, maka dapat pula dikemukakan banyaknya penabung dan jumlah besaran tabungan masyarakat pada berbagai Bank yang ada di Kota Ternate tahun 2004 seperti yang tampak pada tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15
Perkembangan Dana Perbankan Menurut Sumber Dana
Kota Ternate Tahun 2004

No	Bulan	Sumber Dana			Jumlah
		Giro	Deposito	Tabungan	
1	Januari	336.246	376.622	999.416	1.712.284
2	Februari	260.492	369.162	952.366	1.582.020
3	Maret	132.863	185.712	472.349	790.924
4	April	146.413	178.765	473.727	978.905
5	Mei	187.559	173.513	465.310	826.382
6	Juni	184.333	184.283	478.932	847.548
7	Juli	130.452	190.304	482.894	803.650
8	Agustus	163.793	190.777	482.538	837.108
9	September	141.203	186.636	504.257	832.096
10	Oktober	142.386	188.770	484.428	815.584
11	November	229.278	184.661	503.823	917.762
12	Desember	1.055.744	930.224	2.310.356	4.296.324

Sumber : Bank Indonesia Cabang Ternate, 2004

6) Sumber Penerimaan Daerah Lainnya

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp. 68.746.498,- dan mencapai Rp. 2.613.279.379,- pada tahun 2004. Dari peningkatan Realisasi penerimaan tersebut dapat dihitung rata-rata Realisasinya sebesar Rp. 1.473.280.480,- pertahun dan telah memberikan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 21,36% pertahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 253,28% pertahun. Komponen Lain-lain PAD yang sah ini terdiri dari Sumbangan Pihak ketiga, Jasa Giro, Bunga Deposito dan Penerimaan lain-lain juga ikut memberikan kontribusi terhadap PAD yang cukup besar.

Sumbangan Pihak ketiga, untuk tahun Anggaran 2000-2004 merupakan salah satu jenis pendapatan yang mengalami peningkatan cukup signifikan dan telah memberikan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 2,68% pertahun dengan pertumbuhan Realisasi rata-rata sebesar 581,16% pertahun.

Jasa Giro dan Bunga Deposito juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dalam 5 (lima) tahun terakhir. Jasa Giro misalnya, telah memberikan

kontribusi rata-rata 6,23% pertahun dengan pertumbuhan Realisasi rata-rata sebesar 444,45% pertahun. Dan untuk Bunga Deposito pada Tahun Anggaran 2000 tidak ada penerimaan karena belum dianggarkan namun pada tahun anggaran 2001-2004 kontribusi Bunga Deposito terhadap PAD rata-rata dapat mencapai 11,82% pertahun dan tingkat Pertumbuhan Realisasi rata-rata sebesar 67,64% pertahun.

Tabel 2.16
Rekapitulasi Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2000-2005

No	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Propsentase Realisasi %	Pertumbuhan	
					Target %	Realisasi %
1	2000	-	-	-	-	-
2	2001	30.000.000	262.232.218	874,11	-	-
3	2002	3.835.000.000	4.483.811.121	116,92		1.609,86
4	2003	10.911.532.000	10.994.534.920	100,76	184,52	145,21
5	2004	7.099.000.000	7.198.668.739	101,40	(-34,94)	(-34,53)
6	2005	5.639.000.000			(-20,57)	

* Target dan Realisasi (9 bulan)

Sumber : BPKD Kota Ternate, 2005

Selain sumbangan Pihak Ketiga, Jasa Giro dan Bunga Deposito, jenis penerimaan lain pada pos ini seperti Pengujian Kendaraan Roda 2 (Ojeg), Penerimaan Lain-lain dan Dokumen Lelang pada Tahun Anggaran 2002 sudah dianggarkan pada pos Retribusi Daerah menjadi Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 04 tahun 2002 juga memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap peningkatan Penerimaan PAD.

2.1.3 Sosial Budaya Daerah

1) Kependudukan

Jumlah Penduduk

Sumber data kependudukan yang diperoleh berdasarkan hasil proyeksi dari jumlah penduduk tahun sebelumnya (Hasil P4B – 2004), maka sampai dengan akhir tahun 2005, jumlah penduduk Kota Ternate diproyeksikan sejumlah 163.166 jiwa.

Jumlah ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 11.988 jiwa atau 7,929% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 151.178. Tingkat penyebaran penduduk menurut kecamatan dapat dilihat seperti uraian berikut :

- Kecamatan Pulau Ternate : 18.388 jiwa (11,27 %)
- Kecamatan Moti : 4.674 jiwa (2,86 %)
- Kecamatan Ternate Selatan : 72.901 jiwa (44,68 %)
- Kecamatan Ternate Utara : 67.203 jiwa (41,19 %)

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Kota Ternate Menurut Jenis Kelamin

No	Bulan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pulau Ternate	9.281	9.107	18.388
2	Moti	2.323	2.351	4.674
3	Ternate Selatan	37.049	35.852	72.901
4	Ternate Utara	34.034	33.169	67.203
Jumlah Tahun 2005		82.687	80.479	163.166
Total Tahun 2004		76.508	74.67	151.178
Tahun 2003		75.195	73.751	148.946

Sumber : BPS Kota Ternate, 2005

Kepadatan Penduduk

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dalam kurun waktu setahun, kondisi Kota Ternate dirasakan semakin padat. Dengan luas wilayah daratan 250,85 km² dan jumlah penduduk sebanyak 163.166 jiwa, kepadatan penduduk Kota Ternate pada tahun 2005 sebesar 650 jiwa per km². Ini berarti bahwa terjadi peningkatan kepadatan sebanyak 45 jiwa per km² atau 7,43% bila dibandingkan tahun 2004 yang berjumlah 605 jiwa per km².

Perbandingan antar kecamatan dalam wilayah Kota Ternate menunjukkan Kecamatan Ternate Utara memiliki kepadatan penduduk sebesar 2.901 jiwa per km² sekaligus merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya. Sementara ketiga kecamatan lainnya bila diurutkan dari yang paling padat adalah Ternate Selatan, Moti dan Pulau Ternate, masing-masing mempunyai kepadatan penduduk sebesar : 2.517 jiwa/km², 190 jiwa/km² dan 105 jiwa/km².

Rasio Jenis Kelamin, Rumah Tangga, dan Anggota Rumah Tangga

Untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin digunakan suatu indikator yang disebut Rasio Jenis Kelamin (RJK) yang menggambarkan banyaknya laki-laki di antara 100 perempuan. Sesuai hasil proyeksi tahun 2005, RJK Kota Ternate adalah 103, yang berarti lebih banyak laki-laki daripada perempuan, tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu laki-laki juga mendominasi komposisi penduduk dengan RJK sebesar 103. Bila dilihat per kecamatan, Moti memiliki komposisi penduduk yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan dengan rasio sebesar 98,8. Sementara tiga kecamatan lainnya yaitu Pulau Ternate, Ternate Selatan, dan Ternate Utara mempunyai karakteristik yang sama yaitu lebih banyak penduduk laki-laki daripada perempuan dengan rasio jenis kelamin masing-masing di atas 100.

Masih berdasarkan hasil proyeksi, terdapat sejumlah 32.024 rumah tangga di Kota Ternate, dengan jumlah penduduk 163.166 jiwa. Ini berarti terdapat kurang lebih 5-6 jiwa setiap rumah tangga, tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Bila diamati tiap kecamatan maka rata-rata anggota rumah tangga yang mendiami satu rumah tangga adalah berkisar antara 5 sampai 6 jiwa.

2) Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB di Kota Ternate pada tahun 2004 berjumlah 8 orang bayi (umur 0 - < 28 hari) dari 3.162 kelahiran hidup atau 3 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan jumlah bayi lahir mati berjumlah 13 orang. Kematian bayi ini disebabkan oleh BBLR, Asfiksia, dan lain-lain. AKB ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2003 yaitu 2 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA adalah jumlah anak berusia di bawah 5 tahun yang mati selama setahun per-1.000 anak dalam kelompok usia tersebut dalam tahun yang bersangkutan. Kematian balita sangat berkaitan dengan kualitas sanitasi rumah tangga dan keadaan gizi anak.

Pada Tahun 2004 AKABA di Kota Ternate berjumlah 3 orang balita, tepatnya di kota Ternate Selatan berjumlah 1 orang Balita dan 2 orang balita di Kecamatan Moti, dan 15.731 jumlah balita hidup atau 0,2 per 1000 anak Balita. Adapun AKABA di sebabkan oleh berbagai macam kasus, di antaranya diare dan malaria.

Angka Kematian Ibu Maternal (AKIM)

AKIM dapat menggambarkan status gizi dan kesehatan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas. AKIM yang ada diperoleh dari pencatatan dan pelaporan Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di Kota Ternate. Adapun jumlah kematian Ibu di Kota Ternate pada tahun 2004 sebanyak 5 dari 3.162 kelahiran hidup atau 195 per 100.000 kelahiran hidup.

Prevalensi AKIM dari masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota Ternate Utara 0,5%, Kota Ternate Selatan 0,5%, Pulau Ternate 0%, dan Moti 0,1%. AKIM di Kota Ternate mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2003 (235 per 100.000 kelahiran hidup). Adapun penyebab kematian ibu tersebut yaitu, ekiampsia post partum, perdarahan dan penyakit penyerta.

Status Gizi

a. Persentase Balita dengan Gizi Buruk

Hasil pemantauan dan pelaporan dari Puskesmas di wilayah Kota Ternate menunjukkan bahwa dari 10.397 balita yang ditimbang dari 15.731 balita yang ada, terdapat 76 orang dengan status gizi buruk (0,7%), gizi kurang 361 orang (3,5%), dan gizi baik 9.845 orang (70,1%).

b. Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi

Dari 63 Kelurahan yang terdapat pada empat Kecamatan Kota, semua kecamatan bebas rawan gizi.

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Nampak bahwa jumlah penduduk yang menggunakan sarana di Puskesmas wilayah Kota Ternate sebanyak 101.247. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas

merupakan sarana kesehatan dengan tingkat penggunaan tertinggi di semua kecamatan.

Pelayanan Kesehatan

Persalinan yang Ditolong Tenaga Kesehatan

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Ternate pada tahun 2004 adalah 92.9% dengan kisaran terendah 73% di Puskesmas Sulamadaha dan tertinggi di Puskemas Kota yaitu 98.8%.

Peningkatan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kecuali di kecamatan Moti, hal ini dapat terjadi karena untuk 3 kecamatan di setiap kelurahan telah ditempatkan bidan kelurahan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan ibu melahirkan sedangkan untuk Kecamatan Moti penempatan bidan kelurahan di setiap kelurahan baru dilaksanakan pada akhir tahun 2004.

Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan

Jumlah jiwa miskin yang ada di Kota Ternate sebanyak 25.654 jiwa, yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 24.597 jiwa (95.8%), distribusi terbesar jiwa miskin yang mendapat pelayanan kesehatan terdapat pada Puskesmas Gambesi sebesar 99.2% dan terendah di Puskesmas Sulamadaha sebesar 89.9%.

3) Pendidikan

Sarana pendidikan di Kota Ternate relatif memadai karena tersedia mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Demikian juga rasio murid terhadap guru. Pada jenjang pendidikan dasar selama tahun 2004 rasio murid terhadap guru adalah 17 di SD Negeri dan 18 untuk SD swasta. Rasio murid terhadap guru untuk tingkat pendidikan SLTP sebesar 15 pada SLTP Negeri dan 16 di SLTP swasta, sementara untuk SLTA rasio murid terhadap guru adalah 18 di SLTA negeri dan 13 pada SLTA swasta, sedangkan rasio murid terhadap guru adalah 13 untuk SMK Negeri dan 10 untuk SMK swasta.

Tabel 2.18

Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA/SMK di Rinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2003/2004

No	Kecamatan	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA		SMK	
		Neg.	Swasta	Neg.	Swasta	Neg.	Swasta	Neg.	Swasta
1	Pulau Ternate	12	4	10	14	13	12	-	-
2	Moti	13	-	11	-	-	13	-	-
3	Ternate Selatan	21	15	14	14	19	14	17	10
4	Ternate Utara	16	31	19	20	17	11	11	-
Jumlah Rasio		17	18	15	16	18	13	13	10

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2003/2004

Seperti telah disebutkan sebelumnya, di Kota Ternate juga tersedia sarana pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi. Sampai dengan tahun 2004, terdapat 5 buah Perguruan Tinggi yaitu : Universitas Khairun, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kieraha, AIKOM Ternate, dan Politeknik Kesehatan Ternate dengan berbagai Jurusan/Program Studi dan Fakultas yang tersedia.

4) Kesejahteraan Sosial

Data dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana menunjukkan bahwa jumlah KK untuk empat Kecamatan di Kota Ternate adalah 27.479 KK. Dari jumlah tersebut, 3.166 keluarga tergolong miskin dan 3.074 keluarga miskin sekali.

Tabel 2.19

Rekapitulasi Keluarga Miskin Menurut Kecamatan di Kota Ternate Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2004

No	Kecamatan	Jumlah KK	Miskin Sekali		Miskin		KK Miskin	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pulau Ternate	3.990	668	46,78	760	53,22	1.428	35,79
2	Ternate Selatan	11.713	1.530	71,33	615	28,67	2.145	18,31
3	Ternate Utara	10.771	749	32,33	1.575	67,77	2.324	21,58
4	Moti	1.005	127	37,03	216	62,97	343	34,13

Sumber : Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, 2004

Tingkat kemiskinan berdasarkan data dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana tahun 2004 dengan jumlah untuk 4 (empat) Kecamatan di Kota Ternate terdapat dalam tabel 2.19.

5) Agama

Sampai tahun 2004 jumlah sarana tempat ibadah yang ada di Kota Ternate tercatat 164 buah Masjid, 18 buah Gereja Protestan, 1 buah Gereja Katholik dan 1 buah Pura sebagaimana yang tergambar dalam tabel 2.20 berikut :

Tabel 2.20
Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2004

No	Kecamatan	Tempat Peribadatan			Jumlah
		Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katholik	
1	Pulau Ternate	17	7	-	-
2	Moti	8	-	-	-
3	Ternate Selatan	71	8	1	1
4	Ternate Utara	68	3	-	-
Jumlah		164	18	1	1

Sumber : BPS Kota Ternate, 2004

Sampai tahun 2004 jumlah pemeluk agama menurut kecamatan di Kota Ternate dapat digambarkan pada Tabel 2.21 berikut :

Tabel 2.21
Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2004

No	Kecamatan	Tempat Peribadatan				
		Islam	Kristen Protestan	Kristen Katholik	Hindu	Budha
1	Pulau Ternate	17.089	1.069	1.073	-	-
2	Moti	4.489	-	-	-	-
3	Ternate Selatan	63.832	532	409	19	-
4	Ternate Utara	62.844	1.715	424	6	11
Jumlah		148.254	3.316	1.906	25	11

Sumber : BPS Kota Ternate, 2004

6) Pemuda dan Olah Raga

Pemuda adalah penduduk yang berusia mulai dari umur 15 sampai dengan umur 35 tahun. Pembangunan kepemudaan erat kaitannya dalam rangka membentuk generasi muda yang memiliki kualitas dan kemampuan yang handal sehingga menjadi tumpuan harapan daerah dan dapat diandalkan. Sisi lain bahwa pembangunan kegiatan olah raga akan membentuk insan generasi muda yang sehat dan kuat serta bebas dari pengaruh narkoba sebagaimana fungsinya sebagai generasi penerus pembangunan.

7) Kebudayaan

Hakikat dari kebudayaan adalah cipta, rasa dan karsa, yang dimiliki oleh masyarakat dan diimplementasikan dalam sikap keseharian. Sebagai bagian kebudayaan nasional, kebudayaan daerah menjadi sumber motivasi dan simbol moral bagi masyarakat dan memberi pengaruh pada kehidupan masyarakat setempat.

Ternate, yang dikenal sebagai Kota Tua dan sarat dengan sejarah masa lalu, memiliki nilai-nilai budaya lokal yang telah terbukti merupakan perekat sosial dan simbol moral masyarakat secara turun-temurun yang dikemas dengan nama budaya adat se atorang, 'tata laku dan tata atur'.

2.1.4 Prasarana dan Sarana (Infrastruktur) Daerah

1) Infrastruktur Sosial Ekonomi

Banyaknya usaha industri kecil di Kota Ternate semakin berkembang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 jumlah industri kecil sebanyak 300 perusahaan yang terbagi menjadi : industri pangan berjumlah 60 buah; industri kimia dan bahan bangunan sebanyak 187 buah; industri sandang, kulit, kerajinan dan umum sebanyak 46 buah serta industri kecil bidang logam sebanyak 7 buah. Dibanding tahun 2003, usaha industri kecil mengalami kenaikan jumlah sebanyak 118 buah atau sebesar 64,84%.

Banyaknya tenaga kerja yang terserap di sub sektor ini yaitu dari 300 perusahaan yang ada di daerah ini berjumlah 1.190 orang. Jika dilihat berdasarkan jenis industri, maka yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah kelompok industri kimia dan bahan bangunan yaitu sebanyak 804 orang (67,56%), diikuti

dengan industri pangan 208 orang (17,48%); sandang, kulit kerajinan dan umum 160 orang (13,45%) serta industri kecil bidang logam 18 orang (1,51%).

Tabel 2.22
Keadaan Perusahaan Industri Kecil Bidang Pangan di Kota Ternate
Tahun 2004

No	Jenis Perusahaan Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.)
1	Penggeringan Ikan	2	9	1.820.000
2	Minyak Goreng	19	58	18.050.000
3	Mie Kering	3	22	17.872.500
4	Roti	14	43	99.085.000
5	Penggilingan Kopi	1	10	125.000.000
6	Es Balok	5	15	81.825.000
7	Tahu/tempe	2	9	41.950.000
8	Minuman Sari Buah	1	5	25.000.000
9	Cuka Makan	1	6	15.000.000
10	Rumput Laut	12	31	3.700.000
Jumlah		60	208	429.302.500

Sumber : Dinas Perindangkop Kota Ternate, 2005

Tabel 2.23
Keadaan Perusahaan Industri Kecil Bidang Kimia dan Bahan Bangunan di
Kota Ternate Tahun 2004

No	Jenis Perusahaan Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.)
1	Penggergajian Kayu	6	35	294.000.000
2	Kosen Kayu	78	267	466.160.500
3	Sortase Rotan	1	12	59.420.000
4	Perabot Kayu	3	32	31.400.000
5	Meubel Bambu	4	25	15.723.500
6	Percetakan	14	112	915.000.000
7	Genteng	1	15	36.000.000
8	Bata Semen	17	87	197.755.000
9	Bata Merah	3	12	12.334.000
10	Fotocopy	60	207	321.460.000
Jumlah		187	804	2.349.209.000

Sumber : Dinas Perindangkop Kota Ternate, 2005

2) Infrastruktur Pendidikan

Sarana pendidikan di Kota Ternate relatif memadai karena tersedia mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Sampai dengan tahun 2004 jumlah SD baik Negeri/Inpres maupun swasta sebanyak 99 buah. Dalam periode yang sama terdapat 20 buah SLTP negeri dan swasta. Untuk jenjang pendidikan SLTA masih dalam kurun waktu yang sama jumlah SMU negeri dan swasta sebanyak 14 buah. Sedangkan jumlah sekolah SMK Negeri ditambah Swasta sebanyak 5 buah. Untuk jumlah guru dan murid pada tahun yang sama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24

Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri/Inpres Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2003/2004

No	Kecamatan	Sekolah	Gedung	Murid	Guru	Ruang Kelas
1	Pulau Ternate	21	21	2.391	215	126
2	Moti	5	5	569	44	25
3	Ternate Selatan	33	23	6.866	332	198
4	Ternate Utara	24	18	5.264	329	144
Jumlah		83	67	15.090	920	493

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, 2004

Tabel 2.25

Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Ruang Kelas Sekolah Dasar Swasta Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2003/2004

No	Kecamatan	Sekolah	Gedung	Murid	Guru	Ruang Kelas
1	Pulau Ternate	2	2	87	24	12
2	Moti	-	-	-	-	-
3	Ternate Selatan	8	8	1.450	98	48
4	Ternate Utara	6	6	1.569	51	36
Jumlah		16	16	3.106	173	96

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, 2004

Tabel 2.26
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Ruang Kelas Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama Negeri Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate
Tahun 2003/2004

No	Kecamatan	Sekolah	Gedung	Murid	Guru	Ruang Kelas
1	Pulau Ternate	4	4	353	36	14
2	Moti	2	2	309	30	9
3	Ternate Selatan	4	4	2.970	224	64
4	Ternate Utara	3	3	3.128	171	52
Jumlah		13	13	6.760	461	139

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, 2004

Tabel 2.27
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Ruang Kelas Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama Swasta Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate
Tahun 2003/2004

No	Kecamatan	Sekolah	Gedung	Murid	Guru	Ruang Kelas
1	Pulau Ternate	2	2	245	18	10
2	Moti	-	-	-	-	-
3	Ternate Selatan	3	3	602	46	24
4	Ternate Utara	2	2	743	39	20
Jumlah		7	7	1.590	103	54

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, 2004

Tabel 2.28
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Ruang Kelas Sekolah Menengah
Umum Negeri Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate
Tahun 2003/2004

No	Kecamatan	Sekolah	Gedung	Murid	Guru	Ruang Kelas
1	Pulau Ternate	1	1	135	1	3
2	Moti	-	-	-	-	-
3	Ternate Selatan	3	3	3.487	176	36
4	Ternate Utara	2	2	2.271	133	25
Jumlah		6	6	5.893	310	64

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, 2004

Tabel 2.29
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Ruang Kelas Sekolah Menengah Umum Swasta Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2003/2004

No	Kecamatan	Sekolah	Gedung	Murid	Guru	Ruang Kelas
1	Pulau Ternate	1	1	80	7	3
2	Moti	2	2	174	14	7
3	Ternate Selatan	4	4	1.406	106	33
4	Ternate Utara	1	1	215	21	8
Jumlah		8	8	1.875	148	51

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, 2004

Tabel 2.30
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Ruang Kelas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2003/2004

No	Kecamatan	Sekolah	Gedung	Murid	Guru	Ruang Kelas
1	Pulau Ternate	-	-	-	-	-
2	Moti	-	-	-	-	-
3	Ternate Selatan	1	1	1.038	63	18
4	Ternate Utara	2	2	1.077	107	27
Jumlah		3	3	2.115	170	45

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, 2004

Tabel 2.31
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Ruang Kelas Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2003/2004

No	Kecamatan	Sekolah	Gedung	Murid	Guru	Ruang Kelas
1	Pulau Ternate	-	-	-	-	-
2	Moti	-	-	-	-	-
3	Ternate Selatan	2	2	211	23	10
4	Ternate Utara	-	-	-	-	-
Jumlah		2	2	211	23	10

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, 2004

3) **Infrastruktur Transportasi dan Perhubungan**

Jalan Raya

Realisasi pembangunan jalan yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate hingga tahun 2004 mencapai 180,92 km jalan aspal dan 70,50 km masih merupakan jalan tanah. Berdasarkan kondisi jalan, pada tahun yang sama tercatat sepanjang 76,32 km (30,36%) dikategorikan baik, 117,31 km (46,66%) berada dalam kondisi sedang dan sisanya sepanjang 57,79 (22,98%) keadaanya rusak.

Penyeberangan

Jasa angkutan penyeberangan melalui Kota Ternate baik trayek antar Kabupaten dalam Provinsi Maluku Utara maupun menuju Kota Bitung, Sulawesi Utara dilayani oleh PT (Persero) ASDP Cabang Ternate dengan menggunakan beberapa buah kapal Fery.

Volume angkutan baik orang, barang maupun kendaraan roda dua dan empat yang menggunakan jasa penyeberangan kapal Fery setiap tahun terus meningkat seiring dengan makin membaiknya situasi keamanan serta kondisi perekonomian yang cukup menunjang. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada tahun 2004 ini sebesar 6,05%, lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,94.

Sampai akhir tahun 2004 jumlah penumpang yang naik tercatat sebanyak 66.657 orang, kendaraan roda empat 20.334 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 17.589 unit. Terjadi peningkatan khususnya penumpang yang naik dibandingkan tahun 2003 yaitu sebanyak 17.558 orang (35,76%), kendaraan roda empat mengalami kenaikan jumlah sebesar 10.029 unit (97,32%) dan untuk kendaraan roda dua mengalami penurunan sebanyak 412 unit (-2,29%).

Angkutan Laut

Kota Ternate yang mempunyai ciri kepulauan dan memiliki luas lautan lebih besar tentunya memerlukan sarana angkutan laut untuk memperlancar arus penumpang maupun distribusi barang kebutuhan masyarakat dari dan ke luar

daerah ini. Selain itu sebagai pusat perdagangan dan keramaian di Provinsi Maluku Utara, banyak kapal-kapal baik penumpang maupun barang yang berlayar dan singgah di pelabuhan Ternate.

Hingga akhir tahun 2004 kapal yang tiba di pelabuhan Ternate tercatat sebanyak 2.206 call kapal. Sementara volume penumpang kapal yang naik dari pelabuhan Ternate dengan berbagai tujuan di pelabuhan Indonesia lainnya berjumlah 447.341 orang dan penumpang turun selama periode waktu tersebut sebanyak 449.362 orang. Bila dibandingkan tahun sebelumnya terjadi kenaikan arus penumpang baik yang berangkat maupun yang tiba, yaitu untuk penumpang berangkat sebesar 24.646 orang atau sekitar 6% sedangkan penumpang tiba sebanyak 23.910 orang atau hampir 6%. Selain penumpang kapal selama tahun 2004, jumlah pos paket yang dimuat tercatat sebanyak 50.000 buah, dan yang dibongkar berjumlah 241.310 buah.

Angkutan Udara

Sarana angkutan udara di daerah ini semakin menunjukkan perkembangan yang relatif lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan bertambahnya perusahaan atau maskapai penerbangan yang melakukan investasi dengan fasilitas baik berupa tarif maupun pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa penerbangan yang bervariasi. Pada tahun 2004 jalur penerbangan di Kota Ternate dilayani oleh lima maskapai yaitu *Merpati Nusantara Airlines*, *Bouraq Airlines*, *Pelita Air Service*, *Wings Air* yang bekerjasama dengan *Lion Air*, dan *Trigana Air*.

Persaingan tarif penerbangan yang lebih sehat mengakibatkan angkutan udara menjadi alternatif penggunaan sarana bepergian bagi masyarakat dengan alasan harga yang relatif terjangkau serta kenyamanan dalam perjalanan terutama dari segi waktu tempuh.

Kondisi ini berdampak pada peningkatan jumlah penumpang pesawat yang makin bertambah dari tahun ke tahun. Selama tahun 2004 jumlah pesawat datang melalui Bandar Udara Babullah sebanyak 3.571 kali, meningkat 793 kali atau 28,55% sedangkan pesawat berangkat tercatat sejumlah 3.574 kali, mengalami kenaikan sebesar 798 kali atau sekitar 28,73% dibanding tahun 2003. Dengan frekuensi penerbangan tersebut dalam waktu yang sama, tercatat jumlah

penumpang yang datang di Kota Ternate sebanyak 68.746 orang, bertambah 11.844 orang atau 20,81%, sementara jumlah penumpang berangkat sebesar 90.788 orang, meningkat sejumlah 28.899 orang atau sekitar 46,69% dibanding tahun sebelumnya.

Masih di tahun 2004, jumlah barang yang dibongkar tercatat sebanyak 79.192 Kg dan barang yang dimuat sebanyak 43.829 kg. Sementara bagasi yang dibongkar dan dimuat masing-masing tercatat sebanyak 651.576 Kg dan 832.040 Kg.

4) **Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi**

Sampai akhir tahun 2004 jumlah surat dalam negeri yang diterima dan dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Ternate sebanyak masing-masing 139.302 dan 72.222 buah, berarti terjadi penurunan sebanyak 472.112 buah atau 77,22% surat yang diterima dan penurunan jumlah surat yang dikirim sebesar 280.099 buah atau sekitar 79,50% dibanding tahun 2003. Untuk surat luar negeri yang diterima dalam waktu yang sama berjumlah 2.640 buah, mengalami penurunan sebanyak 307.464 buah, sementara surat luar negeri yang dikirim berjumlah 250 buah atau mengalami penurunan sebanyak 307.464 buah dari tahun lalu.

Sarana Telekomunikasi yang tersedia di daerah ini sampai tahun 2004 tercatat sebanyak 77 buah telepon koin dan 52 buah warung telekomunikasi. Jumlah pelanggan telepon selama periode yang sama sebanyak 7.450, berarti mengalami penambahan sejumlah 232 atau sekitar 3,21% dari tahun sebelumnya. Selain fasilitas telekomunikasi tersebut di atas, masyarakat Kota Ternate juga telah banyak menggunakan telepon selular sebagai alat telekomunikasi yang dilayani oleh berbagai operator.

5) **Infrastruktur Air Bersih**

Untuk pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan air bersih Pemerintah Kota Ternate telah mengambil kebijakan pengalokasian dalam APBD setiap tahun melalui program perumahan dan Permukiman, kegiatan dalam program ini antara lain pengadaan sarana dan prasarana air bersih diberbagai kelurahan terutama pada kawasan yang mengalami kelangkaan air bersih, sehingga diharapkan secara bertahap kebutuhan pelayanan air bersih dapat terpenuhi.

Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kota Ternate diperoleh dengan sistem perpipaan (PDAM) dan non perpipaan (Sumur gali dan PAH) seperti dijabarkan pada tabel 2.32 berikut ini :

Tabel 2.32
Sistem Distribusi Air Bersih Setiap Pulau Di Wilayah Kota Ternate
pada Tahun 2004

No	Lokasi	Jumlah Penddk (jiwa)	Sistem Distribusi Air Bersih						Ket
			Perpipaan			Non Perpipaan			
			Jumlah	Penddk Terlayani (Jiwa)	%	Jmh	Penddk Terlayani (jiwa)	%	
1	Pulau Ternate	140.722	14.128 SR + 44 HU	73.940	52,54		66.782	47,46	
2	Pulau Moti	4.563	0	0	0,000		4.563	100,00	
3	Pulau Hiri	2.983	0	0	0		2.983	100,00	
4	Pulau Tifure	852	0	0	0		852	100,00	
5	Pulau Mayau	2.058	0	0	0		2.058	100,00	
Jumlah		151.178	14.128 SR + 44 HU	73.940	48,91		77.238	51,09	

Sumber : PDAM, BPS Kota Ternate, 2004 (Estimasi)

PDAM Maluku Utara sebagai satu-satunya perusahaan penyedia air bersih di Kota Ternate, pada tahun 2004 telah melayani 14.128 Sambungan Rumah (SR) dan 44 Hidran Umum (HU). Dengan demikian Tingkat Pelayanan air bersih adalah sebesar 48,91% atau sebanyak ± 73.940 jiwa penduduk Kota Ternate telah menggunakan PDAM sebagai sumber air bersih. Sedangkan 51,09% penduduk lainnya atau ± 77.238 jiwa masih menggunakan sumur gali (SG) dan penampungan air hujan (PAH).

Saat ini PDAM Maluku Utara memiliki kapasitas sumber air baku sebesar 350 lt/det yang terdiri dari beberapa sumur dalam dan mata air, kapasitas produksi sebesar 274,5 lt/det dan kapasitas distribusi 196,46 lt/det. Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan air bersih yang memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi masyarakat hingga tahun 2010, seperti yang ditargetkan PBB melalui *Millenium Development Goal* (MDG) kemudian dijabarkan pemerintah RI dalam *National Action Plan* (NAP) yakni tingkat pelayanan air bersih

hingga mencapai 80%, maka sudah tentu akan menjadi tugas yang besar bagi pemerintah Kota Ternate. Dengan demikian maka salah satu kegiatan prioritas pemerintah Kota Ternate hingga tahun 2010 adalah melakukan konservasi, eksploitasi dan pengelolaan di bidang air bersih.

6) **Tingkat Pelayanan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Wilayah**

Keberadaan infrastruktur dan sarana prasarana fisik wilayah merupakan bagian dari suksesnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Mengingat saat ini keberadaan fasilitas dan infrastruktur wilayah yang sangat minim di Kota Ternate maka menjadi kendala pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah.

Dapat dikatakan bahwa infrastruktur yang sangat minim baik itu infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur pelayanan masyarakat (misalnya : rumah sakit, Puskesmas, fasilitas pendidikan, fasilitas penerangan dan lain-lain) menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, faktor keterbatasan infrastruktur ini menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan investasi di Kota Ternate.

Maka dengan adanya kesiapan dan tingkat pelayanan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pembangunan serta kemudahan-kemudahan lainnya di suatu wilayah dapat merangsang pertumbuhan pembangunan wilayah tersebut, dimana para investor yang masuk tidak akan segan-segan menanamkan modalnya.

2.1.5 Pemerintahan Umum

1) **Pelayanan Catatan Sipil**

Kegiatan pelayanan catatan sipil di Kota Ternate tidak dapat dipisahkan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate. Pelayanan catatan sipil tersebut meliputi pelayanan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).

Adapun jumlah penduduk yang mengurus akta cacatan sipil di Kota Ternate pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut :

Tabel 2.33
Jumlah Penduduk yang Mengurus Akte Catatan Sipil Menurut Jenis di Berbagai Kecamatan Tahun 2005

No	Kecamatan	Akte Catatan Sipil					
		Kelahiran	Perkawinan	Perceraian	Kematian	KTP	KK
1	Ternate Selatan	1.219	1	-	122	10.711	2.704
2	Ternate Utara	910	6	2	95	9.429	2.386
3	Ternate Pulau	246	61	-	9	1.058	242
4	Moti	39	-	-	-	72	94
Jumlah		2.414	68	2	226	21.27	5.426

Sumber : Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, 2005

2) Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk membantu pasangan atau perorangan dalam mencapai reproduksi secara bertanggung jawab dalam rangka pembangunan keluarga kecil berkualitas dengan memperhatikan dan menghargai hak-hak reproduksi seseorang dalam mengatur jumlah dan jarak kelahiran, sehingga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dapat dihindari dan mengurangi angka kesakitan maupun angka kematian akibat kehamilan dan persalinan yang pada gilirannya akan menurunkan pertumbuhan penduduk.

Jumlah permintaan masyarakat terhadap keikutsertaan dalam berkeluarga berencana di Kota Ternate menunjukkan angka yang cukup besar, Peserta KB aktif pada tahun 2005 mencapai sebanyak 13.603 akseptor atau sekitar 65.63% dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 20.726 orang sehingga dapat diketahui pula jumlah PUS yang belum berkeluarga berencana cukup besar yaitu sebesar 7.123 ditambah dengan PUS yang baru. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program KB dan kurangnya jumlah klinik KB yang ada di Kota Ternate.

Untuk melihat Komposisi perkembangan klink KB di Kota Ternate disajikan pada tabel 2.34 berikut :

Tabel 2.34
Perkembangan Klinik KB Menurut Kecamatan di Kota Ternate
Tahun 2000-2004

No	Kecamatan	Perkembangan Klinik KB Per Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Ternate Selatan	5	5	5	5	6
2	Ternate Utara	4	4	5	5	5
3	Ternate Pulau	1	1	1	1	1
4	Moti	1	1	1	1	1
Jumlah		11	11	12	12	13

Sumber : Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, 2005

Jumlah Permintaan Akseptor Aktif maupun akseptor Baru KB di Kota Ternate pada tahun 2005 disajikan pada tabel 2.35 berikut :

Tabel 2.35
Jumlah Akseptor Aktif dan Akseptor Baru Menurut Metode yang Digunakan
di Kota Ternate Tahun 2005

Kecamatan	Akseptor Aktif							Akseptor Baru						
	Metode Jangka Panjang			Non Metode Jangka Panjang				Metode Jangka Panjang			Non Metode Jangka Panjang			
	IUD	IMP	MOW	Suntikan	Pil	Kon-dom	Lainnya	IUD	IMP	MOW	Suntikan	Pil	Kon-dom	Lainnya
Ternate Selatan	256	678	154	2.100	2.651	74	-	13	20	-	363	171	8	-
Ternate Utara	211	724	182	2.207	2.564	62	-	13	50	2	783	657	84	-
Ternate Pulau	91	208	36	593	692	36	-	7	17	-	75	9	-	-
Moti	-	6	1	32	45	-	-	1	6	1	29	23	-	-
Jumlah	558	1.616	373	4.932	5952	172	-	21	93	3	1250	706	92	-

Sumber : Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, 2005

Kecenderungan meningkatnya angka prevalensi (penggunaan alat dan obat kontrasepsi) merupakan hasil dari peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta ketersediaan alat kontrasepsi. Dengan demikian angka prevalensi perlu terus ditingkatkan agar angka kelahiran terkendali sehingga dapat mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang. Oleh karena itu peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, dan penyediaan alat kontrasepsi menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat kelahiran.

3) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Dalam rangka mendukung kelengkapan sarana dan prasarana permukiman dan prasarana dasar untuk menunjang pengembangan kesejahteraan dan perekonomian daerah maka diperlukan dukungan fasilitas umum yang terkait dengan kegiatan rekreasi, sarana olahraga, sarana ibadah dan fasilitas umum lainnya.

Adapun yang terkait dengan fasilitas sosial adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung sosial seperti pemakaman umum, panti asuhan, dan berbagai lembaga yang bergerak dibidang sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kenyataan yang terjadi di Kota Ternate bahwa keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial belum memenuhi/memadai sebagaimana yang dipersyaratkan. Keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial seharusnya menjadi persyaratan utama bagi kawasan permukiman atau perumahan baik yang dibangun oleh Pemerintah maupun swasta. Hal ini perlu untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitas umum dan fasilitas sosial secara ideal sebagaimana yang dipersyaratkan.

4) Perizinan

Kegiatan perizinan adalah sangat ditentukan oleh sejauh mana kegiatan investasi terjadi di Kota Ternate. Aspek perizinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan investasi di daerah ini. Prosedur perizinan yang efektif dan efisien tentunya harus dibarengi dengan standar pelayanan prima berdasarkan prinsip cepat, murah dan sederhana. Dengan demikian dapat memberikan kemudahan yang pada gilirannya akan menumbuhkan iklim dunia usaha yang semakin kondusif. Oleh karena itu manajemen pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota saat ini melalui pelayanan satu atap, sehingga diharapkan mempermudah proses penyelesaian pengajuan perizinan sesuai standar pelayanan prima.

5) Pasar Modern dan Tradisional

Peran pasar modern dan pasar tradisional dalam suatu daerah merupakan infrastruktur yang sangat vital dalam rangka mendorong percepatan laju ekonomi di daerah tersebut. Kota Ternate hanya mempunyai 1 pasar modern 2 pasar

tradisional. Saat ini pembangunan sarana dan prasarana jasa dan perdagangan pada kawasan pasar Gamalama yang cukup modern dan representatif sedang dilaksanakan. Namun demikian dinamika pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan lebih terkonsentrasi pada kawasan tertentu sehingga menimbulkan kesemrautan kota. Oleh karena itu ke depan diperlukan pengembangan kawasan sentra-sentra ekonomi baru yang merata diberbagai kawasan sehingga tercapai keseimbangan pertumbuhan antar kawasan.

6) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rata-rata tingkat kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketentraman dan ketertiban umum di suatu daerah. Makin rendah angka kejahatan atau pelanggaran yang terjadi maka akan tercipta ketentraman dan ketertiban umum. Keadaan ini sangat didukung oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

7) Perusahaan Daerah Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bagi suatu daerah merupakan sebuah kebutuhan yang tak dapat terelakkan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan komersial lainnya. Namun, keberadaan PDAM untuk Kota Ternate masih menimbulkan kontroversi dan tarik menarik antara Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Daerah Halmahera Barat, terkait dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Ternate. Sesuai amanat undang-undang tersebut bahwa seluruh aset Pemerintah Daerah Halmahera Barat eks Kabupaten Maluku Utara yang berada dalam wilayah Kota Ternate harus diserahkan, namun sampai hari ini belum terealisasi. Hal ini semakin problematis karena khusus menyangkut aset pelayanan publik seperti PDAM secara administratif berada dalam wilayah Kota Ternate, namun kepemilikan dan pengelolaannya masih di bawah kendali Pemerintah Daerah Halmahera Barat. Hal ini memberikan dampak kurang efisien dan efektif dalam pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu ke depan diharapkan adanya kearifan dari Pemerintah Daerah Halmahera Barat untuk dapat menyerahkan aset tersebut kepada Pemerintah Kota Ternate demi pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.

8) Pelayanan Administrasi Kelurahan dan Kecamatan

Perkembangan arah pembinaan Pemerintahan Kelurahan yang telah dilakukan selama ini dalam rangka pemberdayaan otonomi desa terbagi dalam beberapa periode. Pada periode tahun 1999-2000 kebijakan lebih diarahkan pada kegiatan pembinaan rutin administrasi pemerintahan desa. Periode tahun 2001, program pembinaan pemerintahan desa ditingkatkan melalui kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Perda Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Perda Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut Perda Nomor 32 dan 33 Tahun 2001, Pemerintah Kota Ternate melakukan pembinaan dan operasionalisasi perangkat pemerintah di kelurahan dengan melakukan pengisian formasi jabatan dan rekrutmen aparat masing-masing kelurahan yang dibentuk dalam wilayah, hal ini sangat penting mengingat dari segi perencanaan tata ruang wilayah (RUTRW) dan pelayanan masyarakat dengan kondisi masyarakat transisional menuju masyarakat perkotaan.

Langkah strategis yang telah ditempuh dalam rangka pemberdayaan pemerintahan kelurahan dalam tahun 2004 adalah perampungan beberapa produk hukum antara lain perumusan Perda yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 :

1. Perda Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa-desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Ternate.
2. Perda Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi & tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kota Ternate.

Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan pemerintah desa yang lebih otonom agar dapat melaksanakan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih maksimal. Kebijakan ini didukung pula dengan penjabaran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang alokasi DAU untuk pemerintah desa, dimana Pemerintah Kota Ternate telah merealisasikannya sejak Tahun Anggaran 2005. Demikian pula untuk Pemerintah Kelurahan memperoleh alokasi dana APBD sebagai biaya operasional penyelenggaraan pemerintahannya.

9) Pelayanan Umum Pemerintahan

Upaya Pemerintah Kota Ternate dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan adalah dengan mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain dengan merancang SPM. Untuk tahap awal adalah menyusun SPM bidang pemerintahan umum, menerapkan secara terbatas SPM untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta penyampaian secara transparan prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian layanan bagi SKPD yang diberi kewenangan memberikan rekomendasi/perizinan.

2.1.6 Wilayah dan Tata ruang

Pada tatanan wilayah Kota Ternate fungsi **pelayanan primer** diemban oleh **Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan Ternate Selatan** yang dicirikan dengan ketersediaan fasilitas pelayanan terhadap seluruh wilayah pengembangannya terutama dalam konteks pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan fungsi pelayanan sekunder diemban oleh masing-masing **Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua** yang memiliki jangkauan pelayanan terhadap wilayah pengembangan pusat (*central*) ruang kota.

Adapun penetapan sistem pusat pelayanan kota Ternate direncanakan sebagai berikut:

1. Sistem pusat pelayanan kota dikembangkan dalam 1 (satu) pusat pelayanan kota, 4 (empat) sub pusat pelayanan kota, dan 26 (dua puluh enam) pusat lingkungan.
2. Masing-masing Sistem pusat pelayanan kota dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas keamanan dan keselamatan;
3. Pengembangan fasilitas pendidikan terdiri atas:
 - a. TK dan SD dengan jangkauan pelayanan lingkungan;
 - b. SLTP dengan jangkauan pelayanan BWK;
 - c. SLTA dengan jangkauan pelayanan kota; dan
 - d. Pendidikan/Perguruan Tinggi dengan jangkauan pelayanan kota dan regional.

4. Pengembangan fasilitas kesehatan terdiri atas:
 - a. Balai Pengobatan dan praktek dokter dengan jangkauan pelayanan lingkungan;
 - b. Puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotik dengan jangkauan pelayanan SPK; dan
 - c. Rumah sakit dengan jangkauan pelayanan kota dan regional.
5. Pengembangan fasilitas peribadatan menyebar ke seluruh Kota Ternate sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat disesuaikan dengan jangkauan pelayanan masing-masing jenis rumah ibadah serta jumlah dan sebaran pemeluknya.
6. Pengembangan fasilitas keamanan dan keselamatan terdiri atas :
 - a. Mengembangkan fasilitas pos polisi dengan jangkauan pelayanan setingkat lingkungan dan berlokasi di setiap pusat lingkungan;
 - b. Pemadam kebakaran berada dalam jangkauan pusat dan sub pelayanan setingkat kota dan berlokasi di kota ternate;
 - c. Rencana pengembangan pemadam kebakaran dibuat dalam hierarki di setiap kecamatan Kota Ternate.
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dalam jangkauan pelayanan setingkat kota dan berlokasi di sementara Kecamatan Ternate Selatan.

2.1.7 SDA dan Lingkungan hidup

Kemajuan pesat yang dicapai dalam pembangunan di Kota Ternate yang luas wilayah keseluruhannya hanya 5.795,4 Km², disatu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, namun disisi lain juga telah mempengaruhi kemunduran kemampuan daya dukung lahan sebagai akibat terkurasnya sumber daya alam yang terkandung didalam air, tanah, dan hutan. Selain itu, pelaksanaan pembangunan yang beragam juga turut menghasilkan produk sampingan seperti limbah, sampah, baik dalam wujud padat, cair, dan gas maupun tingkat tekanan dan kebisingan.

Masalah lingkungan hidup yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin berkembang dan kompleks. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya permintaan akan ruang wilayah serta sumberdaya alam, yang pada gilirannya bila

tidak dikendalikan secara bijaksana dapat mempengaruhi ketersediaan sumberdaya alam dan mengganggu keseimbangan lingkungan.

Beberapa hal terkait dengan aspek kependudukan yang berkaitan erat dengan sumbangsih tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain :

- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi;
- Persebaran penduduk yang tidak seimbang antara pusat kota yang berada dalam pulau Ternate dengan yang berada di luar pulau Ternate seperti Pulau Hiri, Moti dan pulau-pulau Batang Dua ;
- Peningkatan volume produksi sampah kota sebagai akibat dari aktivitas masyarakat perkotaan dan kegiatan industri, sementara pola penanganan sampah yang efektif dan efisien belum terkelolah dengan baik ;
- Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan masih berorientasi pada sector produksi primer, sehingga jumlah penduduk yang besar cenderung menjadi beban dari pada sumber daya yang potensial;
- Perubahan gaya hidup yang menempatkan manusia dan segala kegiatannya sebagai komponen lingkungan, ke gaya hidup industri yang bersifat antroposentris, yang berakibat pada semakin menyusutnya kearifan tradisional yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Hal tersebut diatas menyebabkan tekanan pada sumber daya alam, sumber daya buatan, dan lingkungan. Beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi selama ini, dan diprediksikan masih akan dihadapi pada masa mendatang antara lain sebagai berikut :

- Penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya air. Kebutuhan akan air untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dll, terus meningkat, sementara itu minimnya pengelolaan limbah yang ada sekarang akan mempengaruhi tingkat pencemaran kota.
- Penurunan kualitas sumber daya tanah/lahan. Penyusutan kawasan hutan dan perubahan fungsi menjadi daerah Permukiman, perkebunan dan pembukaan lahan untuk penambangan yang terus meningkat, sementara laju reboisasi dan rehabilitasi masih belum sepadan dengan penambahan lahan kritis dan kerusakan lahan.

- Penambangan bahan galian C secara destruktif di beberapa lokasi (Darat maupun pesisir pantai) telah mempengaruhi garis bentangan, abrasi pantai yang terjadi maupun konflik antar masyarakat sebagai akibat dari kepentingan ekonomi dengan pengerukkan yang telah melewati batas wilayah mereka.
- Kerusakan ekosistem pesisir dan lautan akibat kegiatan pengambilan terumbu karang, ikan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut lainnya, yang melampaui daya dukung.
- Pencemaran udara khususnya dikawasan perkotaan akibat pemusatan kegiatan transportasi dan industri.
- Peningkatan penduduk yang dibarengi dengan penambahan Permukiman khususnya di Pulau Ternate menyebabkan lahan yang awalnya berfungsi sebagai kawasan hutan dan cathment area mengerucut hingga puncak gunung berapi Gamalama dengan tingkat kemiringan $\geq 40\%$ telah mengalami tekanan perubahan menjadi Permukiman dan perkebunan.
- Kerusakan Danau Ngade dan Tolire yang menjadi kebanggaan dan maskot masyarakat Ternate, dimana danau tersebut yang berada pada kawasan ekosistem basah tengah mengalami kondisi yang memprihatinkan karena terjadi penyusutan luas dan pendangkalan (sedimentasi), okupasi wilayah danau oleh masyarakat untuk pembukaan lahan kebun dan perkembangan perumahan turut menyebabkan fungsi-fungsi ekologis, ekonomis dan sosial budaya dari danau ini tidak lagi optimal.

2.2 Tantangan

1) Kondisi Geografis

- Pulau Ternate termasuk kategori kepulauan kecil yang tersebar.

2) Perekonomian Daerah

- Belum adanya keseimbangan antara perkembangan sektor jasa dan perdagangan dengan sarana dan prasarana.
- Belum terinformasikannya berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kota Ternate kepada pihak-pihak luar.
- Belum tersusunnya masterplan ekonomi Kota Ternate.

- Masih terkonsentrasinya kegiatan perdagangan komoditas primer dan sekunder pada kawasan tertentu, sehingga menimbulkan kesemrawutan.
- Akses transportasi laut ke Pulau Batang Dua relatif belum memadai.
- Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pantai dan pesisir (proses hukum terhadap nelayan asing yang ditangkap tidak transparan).
- Persaingan pasar global yang semakin ketat terhadap berbagai komoditi jasa dan perdagangan dan perlakuan standarisasi internasional.
- Belum adanya komoditi unggulan yang siap ekspor dan bersifat kompetitif.
- Iklim dunia usaha yang belum sepenuhnya kondusif.
- Kelancaran distribusi barang dan jasa yang sering terlambat.
- Sering terganggunya stok kebutuhan pokok masyarakat.
- Minimnya dukungan jasa kelistrikan dan air bersih.
- Belum adanya lembaga dan asosiasi perdagangan yang memadai.

3) Sosial Budaya Daerah

- Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan kerja.
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
- Ketersediaan tenaga pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi tantangan dalam rangka meningkatkan layanan.
- Merebaknya berbagai penyakit menular, kasus kekurangan energi dan protein masih memerlukan penanganan yang lebih optimal.
- Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan serta tingkat prestasi olah raga yang mendukung supremasi olah raga baik tingkat nasional maupun internasional.
- Penduduk miskin termasuk di dalamnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang saat ini jumlahnya masih relatif besar.
- Menipisnya nilai moral, budaya, dan agama, sebagai akibat dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, serta ekkses dari ketimpangan kondisi sosial ekonomi serta pengaruh globalisasi.

- Pembangunan pemberdayaan perempuan masih dihadapkan pada ketimpangan keadilan gender di berbagai bidang, utamanya pada akses di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi.
- Belum terevitalisasinya berbagai pranata budaya yang ada di Kota Ternate.
- Ada pergeseran nilai-nilai budaya lokal.
- Masih kurangnya kebijakan/program yang mengarah pada penguatan dan pelestarian budaya lokal.
- Belum adanya wadah yang representatif dalam menampung aspirasi pelaku seni dan budaya.
- Belum adanya lembaga kebudayaan daerah yang representatif.
- Belum optimalnya budaya kerja, disiplin dan tertib sosial masyarakat.
- Belum terakomodasinya berbagai nilai budaya masyarakat Ternate dan pluralisme masyarakat yang belum mendapatkan penghargaan dari masing-masing etnis, agama, dan ras.
- Adanya inkonsistensi perilaku sosial masyarakat dengan nilai-nilai, norma dan budaya lokal.
- Sebagai Kota Terbuka, pluralitas penduduk telah menyebabkan terjadinya akulturasi dan pergeseran nilai-nilai budaya lokal.
- Pertumbuhan penduduk yang pesat, berimplikasi terhadap keterbatasan lahan permukiman.
- Adanya indikasi perusakan terhadap sejumlah bangunan bersejarah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat menghilangkan jejak sejarah kota ini.
- Kesadaran masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai luhur sejarah dan budaya lokal yang masih rendah, dapat menghilangkan warisan dan kekayaan daerah.
- Jumlah sejarawan dan budayawan lokal yang semakin langka karena tidak adanya regenerasi sejarawan dan budayawan.
- Masih minimnya kegiatan yang bercirikan sejarah dan budaya lokal.
- Rendahnya kesadaran masyarakat berlalu-lintas dan budaya antri.
- Sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang belum memadai.

- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi-potensi pariwisata lokal.
- Masih kurangnya promosi wisata.
- Belum tersusunnya master plan pariwisata.
- Kurangnya kualitas SDM dibidang kepariwisataan, sehingga pengelolaannya belum maksimal.
- Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan investasi sektor pariwisata masih rendah.
- Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi masuk pada lokasi pengembangan Pariwisata di Kota Ternate.
- Kesadaran masyarakat dalam menjaga obyek-obyek wisata yang masih rendah.
- Jalur pariwisata sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan obat-obat terlarang dan terorisme.
- Perilaku wisatawan asing seringkali bertentangan dengan tatanan sosial, etika dan moral masyarakat setempat.
- Kurangnya pengetahuan dari pemandu wisata tentang objek-objek wisata.
- Minimnya jasa kelistrikan dan air bersih dalam menunjang fasilitas pariwisata.
- Belum adanya lembaga atau asosiasi jasa pariwisata yang profesional.

4) Prasarana dan Sarana (Infrastruktur) Daerah

- Pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman pada kurun waktu dua puluh tahun ke depan ketersediaannya harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.
- Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.
- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan sesuai dengan komitmen *Millenium Development Goal* (MDG) pada tahun 2015 harus mampu memenuhi separuh dari kebutuhan cakupan layanan.

- Mengembangkan jaringan telekomunikasi guna memenuhi cakupan layanan telekomunikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- Meningkatnya kebutuhan listrik dan energi bagi rumah tangga dan industri dengan pemanfaatan energi listrik alternatif. Langkah alternatif yang harus dirintis dan dikembangkan adalah penyediaan sumber energi terbarukan untuk mengatasi krisis energi di Kota Ternate pada masa mendatang.
- Minimnya database potensi pantai dan pesisir.
- Belum teridentifikasinya potensi dan karakteristik Kota Pantai.
- Belum tersusunnya *master plan* Kota Pantai.
- Sarana dan prasarana penunjang sektor perikanan dan kelautan yang masih rendah.
- Belum adanya *master plan* sektor perikanan yang komprehensif.
- Keadaan lingkungan alam sekitar pantai kurang mendukung pengembangan sektor lain.
- Air bersih dan sanitasi jauh dari mencukupi.
- Kawasan pantai sangat rentan terhadap pelaku *Illegal Fishing* yang dapat merusak ekosistem laut.
- Pembangunan kota pantai sangat rentan terhadap abrasi laut.
- Pengerukan pasir pada kawasan pantai secara sembarangan untuk tujuan komersial dapat merusak keindahan dan menimbulkan eksesi abrasi dan lingkungan sekitarnya.
- Reklamasi pantai sebagai konsekuensi kota pantai dapat merusak ekosistem pesisir (terumbu karang, padang lamun, hutan bakau).

5) Pemerintahan Umum

- Belum maksimalnya kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat serta pelaksanaan asas dan norma tata pemerintahan yang baik, menjadi tantangan di masa depan guna memenuhi tingkat kepuasan masyarakat.
- Belum terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bekerja secara transparan, akuntabel, dan kualitas prima untuk memenuhi kinerja

pelayanan publik, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang makin maju dan demokratis.

- Melakukan reformasi birokrasi untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Peningkatan kedewasaan politik bagi masyarakat dan pengembangan budaya politik, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih transparan dan lebih bertanggung jawab, non diskriminatif serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik.
- Penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.
- Kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif, khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat untuk mengelola keamanan dan ketertiban tanpa terlalu bergantung kepada peran pemerintah.
- Kelembagaan PEMDA seperti koordinasi dan konsolidasi antar SKPD masih kurang.

6) Wilayah dan Tata Ruang

- Pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan merupakan tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh *stakeholders*.
- Konversi lahan untuk permukiman yang tidak terkendali menyebabkan berkurangnya daerah resapan air.
- Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang telah mulai dirintis saat ini melalui sistem manajemen pertanahan berbasis masyarakat.
- Mengingat semakin terbatasnya sumber daya alam dan adanya arus perdagangan bebas yang semakin kuat sehingga kawasan strategis perlu didorong dan diperkuat eksistensinya.

- Berdasarkan kondisi eksisting pusat pelayanan utama kota saat ini berada di sekitar kawasan Pusat Kota. Sedangkan untuk kearah luar pusat pelayanan kota cenderung tumbuh mengikuti struktur jaringan jalan.
- Penyebaran permukiman berkembang secara sporadis tanpa adanya pola yang jelas.
- Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik.
- Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara integratif.

7) SDA dan Lingkungan Hdup

- Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, meningkatnya pemanasan global serta meningkatnya potensi kejadian bencana longsor, banjir, dan kekeringan.
- Tidak pedulinya sebagian masyarakat akan pentingnya kelestarian alam. Hal ini berdampak pada penurunan sumber daya dan semakin memperparah daerah aliran sungai (DAS), sehingga berdampak terhadap ketersediaan sumber daya air.
- Luas kawasan hutan lindung di Kota Ternate sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 415/Kpts-II/1999 sebesar 3.645,397 Ha, sehingga upaya pencapaian luasan ideal dilakukan dengan pengembangan hutan rakyat. Namun, upaya perluasan hutan rakyat tersebut sangat bergantung kepada konsistensi pola pemanfaatannya.
- Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten.
- Penataan drainase dan pengelolaan persampahan yang belum memadai.
- Minimnya Kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai.

2.3 Modal Dasar

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah Kota Ternate yang merupakan bagian integral dari pembangunan regional dan pembangunan nasional dalam kerangka NKRI.

1) Kondisi Geografis

- Kota Ternate sebagai Kota Pulau dengan nilai sejarah tinggi.
- Kota Ternate terletak di kawasan jalur pasifik.
- Karakteristik Kota Ternate sebagai Kota Pantai.

2) Perekonomian Daerah

- Kota Ternate sebagai "titik patah transportasi" (*Break in transportation*) distribusi barang dan jasa di Provinsi Maluku Utara.
- Memiliki Bandar Udara Babullah.
- Memiliki Pelabuhan Samudera Ahmad Yani.
- Memiliki Pelabuhan Antar Pulau (Pelabuhan Bastiong), sarana angkutan laut dan darat antar wilayah dalam Provinsi Maluku Utara.
- Tersedianya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.
- Tersedianya sarana jasa komunikasi dan informasi.
- Adanya dukungan masyarakat wirausaha cukup besar.
- Memiliki potensi perikanan yang besar.
- Memiliki potensi laut non perikanan.
- Memiliki potensi ekonomi kawasan pantai dan pesisir bagi pengembangan ekonomi berbasis pantai dan laut.
- Tersedianya kawasan pengembangan pembangunan ekonomi di pesisir pantai.
- Luas dan panjang kawasan pantai Kota Ternate memungkinkan untuk pengembangan sentra-sentra ekonomi baru, baik sektor jasa, perdagangan, dan terutama sektor perikanan dan kelautan.
- Terbukanya investasi bagi pengembangan potensi kawasan pantai.

- Terbukanya investasi sektor pariwisata.
- Terbukanya akses investasi lokal, regional maupun ekspor.
- Terpenuhinya kebutuhan fasilitas perdagangan bagi sektor informal.
- Adanya pemerataan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi antar kawasan.
- Terbukanya peluang usaha dibidang agroindustri dan agrobisnis.
- Adanya peluang ekspor terhadap komoditas unggulan terutama sektor perikanan dan kelautan.
- Adanya *Political will* Pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ke kawasan pesisir dan laut.

3) Sosial Budaya Daerah

- Ternate sebagai pusat kesultanan Moloku Kieraha di Maluku Utara.
- Terdapat bangunan-bangunan sejarah bernilai budaya.
- Adanya nilai-nilai budaya kearifan (*local wisdom*).
- Tersedianya lembaga adat *Moloku Kieraha*.
- Masyarakat heterogen (Pluralis),
- Masyarakat Kota Ternate yang agamais.
- Budaya dan sejarah Kota Ternate sangat menarik dan unik.
- Kerajaan Kesultanan Ternate dikenal dalam dan luar negeri.
- Nilai-nilai budaya leluhur dan budaya lokal merupakan modal dalam memperkuat budaya kerja dan budaya disiplin.
- Meningkatnya kesetiakawanan sosial dan toleransi antar umat beragama.
- Nilai-nilai budaya dapat memperkuat nilai-nilai kearifan lokal.
- Tersedianya objek wisata bahari.
- Tersedianya objek wisata sejarah (Benteng peninggalan Portugis dan Belanda).
- Tersedianya objek wisata budaya.
- Karakteristik kawasan pantai Kota Ternate yang unik dan memiliki nilai estetika, sangat prospektif untuk pengembangan wisata pantai.

- Tersedianya objek wisata alam (Danau Laguna, Tolire, Cengkeh Afo, dll).
- Kearifan dan budaya masyarakat Ternate yang sangat menghormati pendatang.
- Sejarah dan perbendaharaan budaya Kota Ternate menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara.
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sektor pariwisata.
- Terbukanya akses informasi, transportasi dan komunikasi lokal, regional, nasional maupun internasional.
- Terpeliharanya berbagai bangunan peninggalan sejarah.
- Perilaku masyarakat sebagai masyarakat pesisir.

4) Prasarana dan Sarana (Infrastruktur) Daerah

- Tersedianya infrastruktur jasa dan perdagangan pada kawasan pantai.
- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang (Hotel, Penginapan dan Restoran).

5) Pemerintahan Umum

- Adanya Undang-undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah yang memberi kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah.
- Kebijakan pemerintah pusat tentang percepatan pembangunan Indonesia Timur yang tertuang dalam Inpres Khusus (Insus) Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2003.
- Jumlah aparat yang cukup memadai serta memiliki keinginan yang besar untuk mengembangkan dan memajukan kota Ternate.

6) Wilayah dan Tata Ruang

- Tersedianya draft Rancangan RTRW.
- Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kawasan kota baru.
- Luas wilayah yang cukup memadai untuk dikembangkan selain untuk wilayah Permukiman.

7) SDA dan Lingkungan Hidup

- Kekayaan alam yang berlimpah baik dari hasil perkebunan maupun hasil kelautan/perikanan.
- Tersedianya energi yang berasal dari gelombang laut yang dapat digunakan sebagai energi terbarukan bagi pembangkit listrik.

2.4 Capaian 2005 -2009

Penyusunan RPJPD Kota Ternate dilaksanakan pada awal tahun 2011, dalam rangka mensinkronisasikan dengan RPJP Nasional yang berdurasi waktu 2005-2025, maka data tahun 2005-2009 akan dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan untuk menyusun arah pembangunan selanjutnya dalam RPJPD ini.

Berikut adalah data dan informasi capaian pembangunan 2005-2009:

2.4.1 Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kota Ternate terletak pada posisi 0°-2° Lintang Utara dan 126°-128° Bujur Timur, Kota Ternate berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku
- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera, dan
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku

Kota Ternate adalah Kota Kepulauan dan terdiri dari 8 pulau, meliputi:

1. Pulau Ternate
2. Pulau Hiri
3. Pulau Moti
4. Pulau Mayau
5. Pulau Tifure
6. Pulau Gurida
7. Pulau Maka
8. Pulau Mano

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara yang didominasi wilayah laut, Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis yang terdiri dari dua musim (Utara-Barat dan Timur-Selatan) yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keragaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah : 0-499 M, Sedang : 500-699 M, dan Tinggi : lebih dari 700 M). Dengan kondisi tersebut, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 pulau. 5 pulau yang berpenghuni, yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan Pulau Tifure, sedangkan untuk 3 pulau kecil yaitu Pulau Maka, Mano dan Gurida, tidak berpenghuni.

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kota Ternate



Kota Ternate secara administrasi dibagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan yang sebelumnya tahun 2004 masih 4 kecamatan dan 77 kelurahan sebagai hasil pemekaran daerah yang sebelumnya pada tahun 2004 masih 63 kelurahan.

Tabel 2.36
Administrasi Wilayah Kota Ternate

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ibu Kota
1	Ternate Utara	14	Dufa-dufa
2	Ternate Tengah	15	Salahudin
3	Ternate Selatan	17	Kalumata
4	Pulau Ternate	13	Jambula
5	M o t i	6	Moti Kota
6	Batang Dua	6	Mayau
7	H i r i	6	Faudu
Jumlah		77	

Sumber : BPS Kota Ternate, 2010

Luas wilayah Kota Ternate 5.795,4 Km², terdiri dari luas perairan 5.633,565 Km² dan luas daratan 161,84 Km². Adapun jarak antara pulau-pulau tersebut dengan pulau Ternate adalah sebagai berikut:

1. Ternate – Hiri : 1,5 ML
2. Ternate – Moti : 16,0 ML
3. Ternate – Maka : 1,6 ML
4. Ternate – Mano : 1,6 ML
5. Ternate – Mayau : 90,0 ML
6. Ternate – Tifure : 106,0 ML
7. Ternate – Gurida : 106,1 ML

2.4.2 Perekonomian Daerah

Pendapatan perkapita masyarakat dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2005 sebesar Rp 2.325.964,- meningkat menjadi Rp 2.387.514,- pada tahun 2006 dan terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga tahun 2009 menjadi sebesar Rp 2.611.890,-. Dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 sebesar 6,05% menjadi 7,94% pada tahun 2009.

Tabel 2.37
Kinerja Makro Ekonomi Kota Ternate Tahun 2005 – 2009

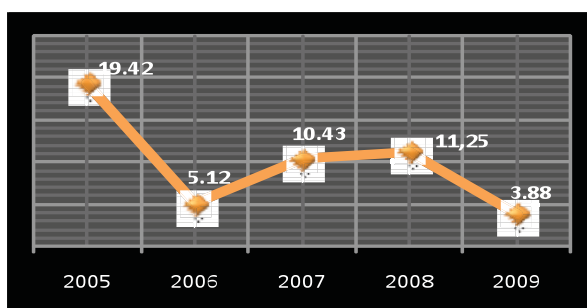
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi		Pendapatan Perkapita (Rp)
	%	Jutaan Rupiah	
2005	6,60	415.085	2.325.964
2006	6,92	443.824	2.387.514
2007	7,85	478.658	2.483.416
2008	7,92	516.574	2.510.879
2009	7,94	557.573	2.611.890

Sumber : BPS Kota Ternate (data diolah), 2010

Perkembangan Inflasi

Inflasi di Kota Ternate lima tahun terakhir mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2005, 2007 dan 2008 inflasi cukup tinggi melebihi 10%, ini banyak disebabkan oleh pengaruh faktor eksternal seperti kenaikan harga BBM. Dari berbagai kelompok pengeluaran rata-rata yang menjadi penyumbang terbesar bagi terjadinya inflasi di Kota Ternate adalah kelompok bahan makanan, ini tidak terlepas dari faktor alam yang kadang menyebabkan ketersediaan komoditi dari kelompok bahan makanan menjadi langka, misalnya komoditi ikan dll. Pada tahun 2009 laju inflasi Kota Ternate kembali stabil yaitu sebesar 3,88% dan untuk bulan pebruari 2010 Kota Ternate mengalami deflasi sebesar -0,07 persen sedangkan nasional mengalami inflasi 0,30 persen.

Gambar 2.3
Perkembangan Inflasi Kota Ternate 2005-2009



Perdagangan

Salah satu potensi Kota Ternate yang cukup menonjol adalah sektor jasa dan perdagangan, perkembangan sektor jasa dan perdagangan dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, sehingga memberikan kontribusi dalam pembentukan struktur ekonomi, meliputi sektor perdagangan, perhotelan dan restoran, jasa, transportasi dan komunikasi.

Investasi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate selama lima tahun terakhir mampu terus tumbuh diatas 6% dengan perkembangan yang lebih meningkat setiap tahunnya, ini memperlihatkan adanya sinergitas antara Program dan kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Ternate dengan pihak swasta yang ikut berperan bagi pertumbuhan ini.

Kemampuan pertumbuhan ekonomi seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak terlepas dari adanya investasi baik swasta maupun pemerintah. Investasi swasta walaupun dalam waktu lima tahun terakhir terjadi fluktuaktif namun dalam waktu dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup berarti (meningkat 72,87%) sedangkan investasi pemerintah terus mengalami kenaikan antar tahun dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.38
Realisasi Investasi Pemerintah dan Swasta Tahun 2005-2009

Tahun	Investasi	
	Swasta (Rp)	Pemerintah
2005	280.655.598.800	59.094.538.220
2006	233.443.104.725	82.790.296.946
2007	175.408.117.780	155.337.254.952
2008	119.327.074.000	170.920.820.065
2009	163.742.236.000	176.890.457.165

Sumber : DPPKAD Kota Ternate, 2010

2.4.3 Koperasi dan UKM

Perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi Kota Ternate. Kegiatan perkoperasian di Kota Ternate tumbuh berkembang, namun relatif lambat. Jumlah koperasi tahun 2005 sebanyak 212 kemudian menjadi 261 koperasi tahun 2009 atau tumbuh rata-rata sebesar 5,34 persen per tahun. Sementara, jumlah anggota terus meningkat dari 16.553 orang pada tahun 2005 menjadi 17.898 orang pada tahun 2009 (lihat Tabel 2.39).

Tabel 2.39
Jumlah Koperasi di Kota Ternate Tahun 2005 – 2009

Tahun	Jumlah Unit Koperasi	Jumlah Anggota	Modal Usaha (000)	Volume Usaha/ Omzet (000)
2005	212	16.553	7.327.007	11.807.006
2006	227	16.990	7.570.495	13.275.658
2007	241	17.335	7.831.303	14.616.600
2008	251	17.576	8.057.822	21.433.400
2009	261	17.898	8.227.829	29.939.150

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, 2010

Peran koperasi masih belum optimal sebagai pilar perekonomian daerah. Hambatan dalam pengembangan UKM antara lain adalah terbatasnya akses koperasi dan UKM terhadap sumber daya produktif terutama permodalan, dan lemahnya kualitas SDM pelaku usaha. Selain itu, faktor penghambat pengembangan UKM adalah terbatasnya penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar.

Sementara itu, perkembangan UMKM di Kota Ternate menunjukkan peningkatan dari 4.222 unit pada tahun 2005 menjadi 6.563 unit pada tahun 2009 dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,78 persen per tahun (Tabel 2.40). Kendala pengembangan UMKM adalah terbatasnya akses permodalan, lemahnya manajemen usaha, belum berkembangnya sistem data dan informasi, dan terbatasnya jaringan pemasaran.

Tabel 2.40
Jumlah UMKM Kota Ternate Tahun 2005 – 2009

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Total	%
2005	0	3.629	593	4.222	86%
2006	1.835	1.971	657	4.463	85%
2007	1.952	2.114	784	4.850	84%
2008	2.880	2.161	786	5.827	87%
2009	3.412	2.365	786	6.563	88%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, 2010

2.4.4 Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tingkat kemiskinan Kota Ternate tergolong rendah yaitu 3,79% untuk tahun 2008. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, tingkat kemiskinan mengalami penurunan walaupun angkanya tidak signifikan. Secara absolute jumlah penduduk miskin masih tetap sekitar 6,9 ribu jiwa. Kondisi ini menempatkan Kota Ternate termasuk kelompok yang memiliki persentase penduduk miskin di bawah rata-rata nasional (15,42 persen). Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan.

Tabel 2.41
Statistik Kemiskinan Kota Ternate

Uraian	2007	2008
Garis Kemiskinan	228.202	253.491
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	6,9	6,9
Penduduk Miskin (%)	3,90	3,79

Sumber : BPS, Susenas 2008

2.4.5 Ketenagakerjaan

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun keatas), sekitar 87% penduduk Kota Ternate termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami sedikit penurunan selama periode 2008-2009 dari 60,58% menjadi 53,97%. Walaupun

demikian tetapi jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari 87,43% menjadi 88,77%.

Pasar tenaga kerja Kota Ternate cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja yang besarnya mencapai lebih dari 88% pada tahun 2009. Tingkat pengangguran pada tahun 2009 menunjukkan angka penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2008. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 7,61%. Angka ini menurun menjadi 6,06% pada tahun 2009.

Tabel 2.42
Statistik Ketenagakerjaan di Kota Ternate

Uraian	2008	2009
TPAK (%)	60,58	53,97
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,61	6,06
Bekerja (%)	87,43	88,77
Bekerja di Sektor A (%)	17,83	16,75
Bekerja di Sektor M (%)	36,16	31,12
Bekerja di Sektor S (%)	46,01	52,13

Sumber : BPS, Sakernas 2009

2.5. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Kota Ternate diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.5.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun waktu 2005-2009 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2005-2009 menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah memenuhi target yang telah ditetapkan (Tabel 2.43). Pendapatan daerah terus meningkat sebesar 40,24 persen pada tahun 2006, 30,31 persen pada tahun 2007, 6,21 persen pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 14,11 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,72 persen per tahun. Pendapatan Asli Daerah juga terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,48 persen. Sementara, pertumbuhan dana perimbangan rata-rata per tahun sebesar 19,85 persen.

Tabel 2.43
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate
Tahun 2005-2009 (Rp. Juta)

Tahun		PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan	Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD Thd Pendapatan Daerah (%)
2005	T	11.781.000	175.968.000	9.545.820	197.294.820	5,97
	R	11.910.137	184.336.254	11.365.626	207.611.018	5,73
2006	T	14.750.500	260.401.320	3.405.000	278.556.820	5,29
	R	16.765.470	270.973.303	3.404.803	291.143.577	5,76
2007	T	18.025.000	334.620.627	5.622.000	358.267.627	5,03
	R	18.640.985	342.786.067	17.974.284	379.401.337	4,91
2008	T	23.075.000	355.847.157	34.138.914	413.061.071	5,58
	R	23.081.410	343.433.456	36.451.348	402.966.215	5,72
2009	T	26.905.000	363.203.346	73.215.063	463.323.409	5,80
	R	23.571.413	363.020.229	73.241.634	459.833.277	5,12

Keterangan : T = Target R=Realisasi

Sumber : Dinas PPKAD Kota Ternate Tahun 2010

Struktur pendapatan daerah Pemerintah Kota Ternate menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 5,45 persen per tahun selama periode 2005-2009. Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 87,82 persen per tahun. Struktur pendapatan tersebut menegaskan perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan. Dengan demikian, tantangan pengelolaan pendapatan daerah periode 2010-2015 adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perkembangan struktur PAD menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 34,09 persen per tahun, rata-rata sumbangan retribusi daerah terhadap PAD adalah 35,88 persen per tahun, hasil pengelolaan kekayaan daerah 0,11 persen per tahun dan lain-lain PAD yang sah 29,92 persen per tahun.

Tabel 2.44
Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2009

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Lain-lain PAD yang Sah		Total	
	Nilai (Rp Juta)	(%)	Nilai (Rp Juta)	(%)	Nilai (Rp Juta)	(%)	Nilai (Rp Juta)	(%)	Nilai (Rp Juta)	(%)
2005	4.639.045	38,95	4.375.554	36,74	-	-	2.895.537	24,31	11.910.137	100
2006	5.327.093	31,77	5.361.447	31,98	-	-	6.076.928	36,25	16.765.470	100
2007	5.781.772	31,02	6.099.819	32,72	-	-	6.759.393	36,26	18.640.985	100
2008	7.876.232	34,12	8.384.763	36,33	-	-	6.820.414	29,55	23.081.410	100
2009	8.157.823	34,61	9.810.752	41,62	128.865	0,55	5.473.971	23,22	23.571.413	100
Rata-rata	6.356.939	34,09	6.806.467	35,88			5.605.247	29,72	18.793.883	100

Sumber : Dinas PPKAD Kota Ternate Tahun 2010

Tabel 2.45
Realisasi Pajak Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2009 (Rp Juta)

Uraian		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pajak Hotel dan Restoran	494.290	674.098	1.035.167	1.304.521	1.518.978
2	Pajak Hiburan	13.300	86.795	52.374	30.586	32.390
3	Pajak Reklame	387.000	406.021	573.130	688.032	722.775
4	Pajak Penerangan Jalan	2.319.301	2.494.122	2.705.515	3.846.901	3.657.320
5	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C	1.425.152	1.666.054	1.415.584	2.006.191	2.212.359
6	Pajak Usaha Rumah Kost	-	-	-	-	14.000

Sumber : Dinas PPKAD Kota Ternate Tahun 2010

Sumber pendapatan daerah Kota Ternate juga berasal dari Dana Perimbangan. Dalam kurun waktu 2005-2009, Dana Perimbangan Kota Ternate rata-rata mencapai Rp. 300.909.862 juta per tahun, sedangkan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 36.256.289 juta per tahun, Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 8.074.250 juta per tahun, dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 218.430.961 juta per tahun. Dari segi pertumbuhan selama periode tersebut, penerimaan total dana perimbangan meningkat rata-rata sebesar 19,85 persen per tahun, bagi hasil pajak rata-rata sebesar 8,58 persen per tahun, bagi hasil bukan pajak rata-rata sebesar 26,14 persen dan dana alokasi umum rata-rata sebesar 18,81 persen.

Struktur penerimaan dari dana perimbangan Kota Ternate menunjukkan bahwa dana alokasi umum rata-rata menyumbang sebesar 72,87 persen, bagi hasil bukan pajak rata-rata sebesar 2,65 persen dan bagi hasil pajak rata-rata sebesar 12,45 persen per tahun (Tabel 2.46)

Tabel 2.46
Realisasi Dana Perimbangan Kota Ternate
Tahun 2005-2009 (Rp Juta)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
A. BAGI HASIL PAJAK	28.332.254	38.118.201	39.233.654	34.928.621	40.668.715
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.624.289	33.619.696	32.854.323	27.193.879	31.766.056
2. Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.816.432	1.863.536	2.950.966	3.363.956	3.714.174
3. P P h Pasal 21	1.891.533	2.634.969	3.428.364	4.370.785	5.188.484
B. BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM	4.777.244	5.345.706	13.474.144	10.147.991	6.626.168
1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.608.338	1.581.283	2.142.702	1.879.504	629.522
2. Royalty	2.850.589	3.463.543	10.967.998	8.105.273	5.856.075
3. Perikanan	318.317	300.879	363.443	163.213	140.570
C. Dana Alokasi Umum	137.416.895	202.669.720	244.043.000	245.930.844	262.094.346
D. Dana Alokasi Khusus	13.809.860	24.839.675	46.035.267	52.426.000	53.631.000
Total Dana Perimbangan	184.336.254	270.973.303	342.786.067	343.433.456	363.020.229

Sumber : Dinas PPKAD Kota Ternate Tahun 2010

2.5.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah tahun anggaran 2007 menunjukkan bahwa belanja langsung sebesar 61,18 persen dan belanja tidak langsung sebesar 38,82 persen. Belanja tidak langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai (83,19 persen). Sementara belanja langsung digunakan untuk belanja modal sebesar 62,92 persen dan belanja barang dan jasa sebesar 22,87 persen (lihat Tabel 2.47).

Tabel 2.47
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 (Rp Juta)

Uraian	Tahun 2007			Tahun 2008		
	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
BELANJA	404.895.712	365.164.244	90,19	460.567.024	429.167.129	93,18
1. Belanja Tidak langsung	154.456.997	141.757.882	91,78	173.274.066	163.250.445	94,22
- Belanja Pegawai	129.917.997	117.928.427	90,77	162.845.566	152.897.533	93,89
- Belanja Bunga	-	-	0	-	-	0
- Belanja Subsidi	-	-	0	-	-	0
- Belanja Hibah	-	-	0	-	-	0
- Belanja Bantuan Sosial	23.539.000	22.950.525	97,50	9.248.500	9.248.050	100
- Belanja Bantuan Keuangan	-	-	0	-	-	0
- Belanja Tidak Terduga	1.000.000	878.929	87,90	1.180.000	1.104.862	93,63
2. Belanja Langsung	250.438.714	223.406.362	89,21	287.292.958	265.916.683	92,56
- Belanja Pegawai	32.585.160	31.743.489	97,42	42.344.115	39.827.563	94,06
- Belanja Barang dan Jasa	52.903.949	51.102.836	96,60	74.028.562	70.463.569	95,18
- Belanja Modal	164.949.604	140.560.035	85,21	170.920.280	155.625.551	91,05
II. PEMBIAYAAN	36.801.216	36.801.216	100	46.783.610	46.783.610	100
1. Penerimaan Daerah	41.301.216	41.301.216	100	50.783.610	50.783.610	100
- SILPA	41.301.216	41.301.216	100	50.783.610	50.783.610	100
2. Pengeluaran Daerah	4.500.000	4.500.000	100	4.000.000	4.000.000	100
- Penyertaan Modal	4.500.000	4.500.000	100	4.000.000	4.000.000	100

Sumber : Dinas PPKAD Kota Ternate, 2010

Struktur belanja daerah tahun anggaran 2008 sedikit berbeda dengan belanja tahun anggaran 2007. Pada tahun 2008, rasio belanja langsung terhadap total belanja adalah 61,96 persen, sedangkan belanja tidak langsung sebesar 38,04 persen. Belanja tidak langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai (93,66 persen). Sementara belanja langsung digunakan untuk belanja modal sebesar 58,82 persen dan belanja barang dan jasa sebesar 26,50 persen.

Belanja daerah tahun anggaran 2009 menunjukkan bahwa belanja langsung sebesar 58,77 persen dan belanja tidak langsung sebesar 41,23 persen. Belanja tidak langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai (93,50 persen). Sementara belanja langsung digunakan untuk belanja modal sebesar 57,66 persen dan belanja barang dan jasa sebesar 28,70 persen (lihat Tabel 2.48).

Tabel 2.48
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Rp. Juta)

Uraian	Tahun 2009		
	Rencana	Realisasi	%
BELANJA	502.706.110	475.234.718	94,54
1. Belanja Tidak langsung	199.395.270	195.961.187	98,28
- Belanja Pegawai	186.481.770	183.224.075	98,25
- Belanja Bunga	-	-	-
- Belanja Subsidi	-	-	-
- Belanja Hibah	2.350.000	2.350.000	100
- Belanja Bantuan Sosial	8.313.500	8.310.977	99,97
- Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	2.250.000	2.076.133	92,27
2. Belanja Langsung	303.310.840	279.273.531	92,08
- Belanja Pegawai	41.646.533	38.087.349	91,45
- Belanja Barang dan Jasa	84.773.849	80.148.056	94,54
- Belanja Modal	176.890.457	161.038.125	91,04
II. PEMBIAYAAN	39.382.701	18.458.492	46,87
1. Penerimaan Daerah	40.582.701	19.608.492	48,32
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	20.582.701	19.608.492	95,27
- Penerimaan Pinjaman Daerah	20.000.000	-	0
2. Pengeluaran Daerah	1.200.000	1.150.000	95,83
- Penyertaan Modal (Investasi)	1.200.000	1.150.000	95,83

Sumber : Dinas PPKAD Kota Ternate, 2010

2.6. Sosial Budaya Daerah

2.6.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Ternate tahun 2010 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Ternate berdasarkan hasil Sensus Penduduk sebanyak 185.707 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,98 persen per tahun selama 2008-2010. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tingkat fertilitas yang tinggi.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kondisi Kota Ternate dirasakan semakin padat. Dengan luas wilayah daratan 161,84 km² dan jumlah penduduk sebanyak 185.707 jiwa, kepadatan penduduk Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar 1147 jiwa per km². Ini berarti bahwa terjadi peningkatan kepadatan sebanyak 7 jiwa per km² atau 0,61% bila dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 1.140 jiwa per km². Penduduk Kota Ternate sebagian besar tinggal di Pulau Ternate dan tantangan yang harus diatasi adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk.

2.6.2 Pendidikan

Pada tahun 2009 Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk berusia 7-12 tahun (SD) sebesar 103,47 persen, untuk Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 92,94 persen dan Angka Putus Sekolah sebesar 0,12 persen. Sedangkan APK kelompok usia 13-15 tahun (SMP) adalah sebesar 102,36 persen, untuk Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 89,94 persen dan Angka Putus Sekolah sebesar 0,16 persen. Dan APK untuk usia 16-18 tahun (SMA/SMK) sebesar 96,80 persen, untuk Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 87,64 persen dan Angka Putus Sekolah sebesar 0,16 persen. Angka ini tersebut sudah tergolong baik dibanding kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir semua penduduk Kota Ternate berusia 7-18 tahun telah bersekolah (Tabel 2.49). Namun masih terdapatnya angka putus sekolah terutama untuk kelompok usia 16-18 tahun merupakan permasalahan pendidikan yang harus diatasi.

Tabel 2.49
Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM)
dan Angka Putus Sekolah Kota Ternate 2005-2009

Tahun	SD			SMP			SMA/SMK		
	APK	APM	APS	APK	APM	APS	APK	APM	APS
2005	91,86	82,95	0,13	93,54	84,78	0,12	92,36	84,32	0,47
2006	93,73	83,65	0,26	92,87	86,09	0,26	92,79	85,63	0,23
2007	94,34	84,56	0,17	92,47	86,34	0,38	93,45	86,65	0,37
2008	102,39	87,38	0,09	95,85	89,92	0,31	94,67	87,32	0,43
2009	103,47	92,94	0,12	102,36	89,94	0,16	96,80	87,64	0,16

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, 2010

Kondisi pendidikan ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan tenaga pengajar. Dalam periode 2009/2010, jumlah sekolah SD sebesar 100 unit (83 Negeri dan 17 Swasta). Sementara tenaga pengajar SD meningkat rata-rata sebesar 15 persen periode tahun 2005-2009, dengan jumlah guru tahun 2009 mencapai 1.483 orang dan jumlah murid SD pada tahun 2009 sebesar 19.776 orang. Rasio murid terhadap guru sebesar 13,33 artinya setiap guru melayani 13 orang murid.

Pada jenjang pendidikan SMP, bangunan sekolah pada tahun 2009 sebanyak 26 unit (14 Negeri dan 12 Swasta). Jumlah guru sebanyak 745 orang pada tahun 2009 dan meningkat rata-rata sebesar 15,20 persen per tahun periode 2005-2009. Sedangkan jumlah murid SMP pada tahun 2009 mencapai 8.742 orang. Rasio murid terhadap guru sebesar 11,73 artinya setiap guru melayani 11 orang murid.

Pada jenjang pendidikan SMA dan SMK, pada tahun 2009 bangunan sekolah sebanyak 22 unit (SMU : 9 Negeri dan 4 Swasta, SMK : 6 Negeri dan 3 Swasta), jumlah guru sebanyak 508 untuk SMA dan 226 untuk SMK, yang meningkat rata-rata sebesar 8 persen untuk SMA dan 18,70 untuk SMK per tahun periode 2005-2009. Sedangkan jumlah murid SMA pada tahun 2009 mencapai 6.816 orang dan 2.147 orang untuk SMK. Rasio murid terhadap guru sebesar 13,41 untuk SMA dan 9,5 untuk SMK, artinya setiap guru melayani 13 orang murid untuk SMA dan 9 orang murid untuk SMK.

2.6.3 Kesehatan

Pencapaian program peningkatan derajat kesehatan di Kota Ternate juga belum maksimal terlihat dari beberapa indikator program misalnya pada tahun 2005 angka kematian ibu jumlahnya 6 dari 3.135 ibu hamil dan angka kematian bayi sebesar 20 bayi dari 3.135 kelahiran. Jika dilihat dari jumlah kematian masih tinggi, hal ini disebabkan karena pengetahuan ibu tentang ibu hamil belum maksimal dan lebih suka melakukan pemeriksaan kehamilan kepada dukun bayi dan lebih banyak yang meninggal dunia. Ibu hamil yang mengalami kerentanan tersebut, seringkali lambat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih baik karena tempat tinggalnya berada di luar pulau Ternate. Pada tahun 2006 angka kematian ibu jumlahnya 7 dari 4.079 ibu hamil, angka kematian bayi sebesar 8 bayi dari 3.554 kelahiran hidup, dan angka kematian balita 3 bayi. Tahun 2007 cenderung menurun yakni angka kematian ibu jumlahnya 5 dari 4.079 ibu hamil, angka kematian bayi 12 dari 3.436 kelahiran hidup dan angka kematian balita 7 bayi. Tahun 2008, angka kematian ibu jumlahnya 6 dari 4.244 ibu hamil, angka kematian bayi 9 dari 3.733 kelahiran hidup dan angka kematian balita 13 bayi. Tahun 2009, angka kematian ibu hamil menurun menjadi 3 ibu hamil, angka kematian bayi 10 dari 2.958* kelahiran hidup dan angka kematian balita 14 bayi dari 18.211 sasaran balita.

Begitu pula pada angka kesakitan pada tahun 2005 akibat ISPA sebanyak 34.616 orang, malaria klinis sebesar 9.859 orang, positif malaria 3.113 orang, DBD 19 orang, sedangkan HIV/AIDS belum ditemukan. Penderita malaria klinis cenderung menurun pada tahun 2006-2009 yakni 8.221 orang, 7.775 orang, 6.661 orang dan 6.080 orang. Sama halnya dengan penderita positif malaria yang menunjukkan gejala penurunan sepanjang tahun 2006-2008 yakni 1.548 orang, 1.010 orang dan 474 orang, namun di tahun 2009 tercatat 1.012 orang penderita positif malaria, yang penanganannya dilakukan di setiap kelurahan endemis malaria. Penderita DBD cenderung masih tinggi sepanjang tahun 2006-2009, yakni 72 orang, 202 orang, 116 orang dan 154 orang. Gejala mengejutkan terdapat pada tahun 2007 dan 2008 yakni penderita HIV/AIDS 3 orang dan 2 orang. Penderita penyakit malaria dan DBD masih tinggi karena kepedulian masyarakat tentang lingkungan masih rendah begitu pula dengan perilaku hidup bersih dan sehat belum dipahami secara utuh.

Penderita gizi buruk pada tahun 2005 masih tinggi karena pengetahuan tentang gizi dan perkembangan anak belum maksimal, ditambah lagi dengan tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah sehingga mempengaruhi kualitas dan perkembangan anak. Untuk tahun 2008 terdapat 8 bayi yang mengalami gizi buruk, sedangkan di akhir tahun 2009 tercatat 7 bayi yang mengalami gizi buruk, hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang gizi dan perkembangan anak sudah semakin membaik.

Kondisi kota Ternate pada tahun 2005, baru saja selesai dilanda kerusuhan horisontal dimana pada saat itu infrastruktur di kota Ternate sebagian mengalami kerusakan. Sarana pelayanan kesehatan kesehatan masih kurang sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga mengalami penurunan. Jumlah sarana pelayanan kesehatan sebatas 7 Puskesmas (rawat jalan 6 unit, rawat inap 1 unit), Puskesmas Pembantu 13 unit, Polindes 3 unit, Pusling 6 unit dan Polindes 5 unit.

Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia belum menjangkau semua masyarakat di kota Ternate yang tersebar di beberapa pulau. Ini disebabkan karena dana pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana relatif masih sedikit, sehingga pembangunan sarana dan prasarana kesehatan belum menjangkau seluruh masyarakat kota Ternate, utamanya masyarakat di luar pulau Ternate. Fasilitas kesehatan Puskesmas selama tahun 2005-2007 belum mengalami peningkatan dan baru pada tahun 2008 jumlahnya bertambah menjadi 8 Puskesmas. Pustu meningkat pada tahun 2007 dan 2008 menjadi 14 Pustu, dibandingkan pada tahun 2005 dan 2006 sebanyak 13 Pustu, dan untuk tahun 2009 menjadi 15 pustu. Pusling cenderung naik dari 6 Pusling (tahun 2005), 9 Pusling (tahun 2006 dan 2007), 11 Pusling (tahun 2008), menjadi 12 Pusling (tahun 2009). Rumah medis atau paramedis bertambah dari 15 rumah (tahun 2005 dan 2006) menjadi 17 rumah (tahun 2007) dan 18 rumah (tahun 2008-2009). Polindes cenderung meningkat terus berawal dari 5 Polindes (tahun 2005), meningkat pesat menjadi 13 Polindes (tahun 2006), 14 Polindes (tahun 2007), 15 Polindes (tahun 2008) dan 16 Polindes (tahun 2009). Sedangkan Poskeskel baru tersedia 3 Poskeskel (tahun 2007) dan 6 Poskeskel (tahun 2008-2009).

2.6.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan

capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang dicapai Kota Ternate dalam pembangunan manusia sangat signifikan. Angka IPM Kota Ternate mengalami peningkatan dari 75,66 pada tahun 2008 menjadi 76,13 pada tahun 2009. Angka IPM Kota Ternate diatas angka IPM Provinsi Maluku Utara yaitu 68,63. Bila dilihat dari angka ini bisa disimpulkan bahwa penduduk Kota Ternate lebih maju di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi dari Kab/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. IPM kab/kota lain di Provinsi Maluku Utara berkisar antara 64 sampai dengan 68.

Tabel 2.50
IPM Kota Ternate Tahun 2005-2009

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)
2005	74,21
2006	74,63
2007	74,93
2008	75,66
2009	76,13

Sumber : BPS, 2010

2.7. Prasarana dan Sarana (Infrastruktur) Daerah

2.7.1 Jalan Darat

Faktor utama untuk kelancaran perhubungan darat adalah tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota, memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan serta menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Terdapat tiga tipe (jenis jalan), yaitu jalan tanah, jalan lapen dan jalan hotmix. Pada tahun 2005 di wilayah Kota Ternate tersedia jalan sepanjang 246.813 km, yang terdiri dari jalan tanah sepanjang 58.079 km, jalan lapen sepanjang 114.455 km dan jalan hotmix sepanjang 74.279 km. Pembangunan jalan di Kota Ternate lebih banyak didominasi Jenis Jalan Lapen. Rasio Jalan Tanah terhadap total jalan di Kota Ternate sebesar 23,53 %, Rasio Jalan Lapen sebesar 46,37 % dan Rasio Jalan Hotmix sebesar 30,10 %. Jenis jalan di Kota Ternate 2005-2009 dapat dilihat pada tabel 2.51.

Tabel 2.51
Jenis Jalan di Kota Ternate Tahun 2005-2009

No	Panjang Jalan (Km)						Ket
	Jenis Jalan	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Jalan Tanah	58.079	55.479	52.884	58.547	42.720	
2	Jalan Lapen	114.455	125.213	129.815	138.948	150.643	
3	Jalan Hotmix	74.279	79.279	84.139	89.279	94.913	
	Jumlah	246.813	259.971	266.838	286.774	288.276	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, 2010

Dari Tabel 2.51 menunjukkan bahwa pada tahun 2009 panjang jalan lapen mendominasi dengan 150.643 Km. Untuk pembangunan sarana dan prasarana Jalan lingkungan, jalan setapak dan Jembatan pelintas dapat dilihat pada tabel 2.52.

Tabel 2.52
Pembangunan Jalan Lingkungan, Jalan Setapak dan Jembatan Pelintas di Kota Ternate 2005-2009

Tahun	Panjang Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Setapak	Jembatan Pelintas
2005	762 M'	419 M'	-M ² (- Unit)
2006	5.056 M'	2.312 M'	74 M ² (4 Unit)
2007	3.233 M'	4.061 M'	48 M ² (3 Unit)
2008	5.602 M'	1.958 M'	177 M ² (6 Unit)
2009	4.321 M'	4.556 M'	108,5 M ² (5 Unit)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, 2010

2.7.2 Angkutan Perkotaan

Kota Ternate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perlu didukung dengan sistem transportasi yang memadai. Pertumbuhan kendaraan dalam Kota Ternate dewasa ini cukup berpotensi secara signifikan sebagai penyebab utama kemacetan lalu lintas, karena tidak diimbangi dengan panjang jalan yang ada.

2.7.3 Terminal

a. Fasilitas Terminal

Dalam mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, pembangunan terminal penumpang dan barang perlu dilakukan dengan memperhitungkan fungsi pelayanan penyebaran, yaitu terminal utama dan terminal lokal.

b. Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Keselamatan lalu lintas, khususnya lalu lintas jalan, adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar, karena keselamatan berkaitan langsung dengan nyawa manusia. Untuk maka keselamatan lalu lintas jalan perlu ditingkatkan melalui pengadaan perlengkapan jalan, seperti : marka jalan, pagar pengaman, rambu-rambu lalu lintas, APILL, *traffic light*, RPPJ, mobil derek, peralatan pengujian kendaraan bermotor dan lain sebagainya pada ruas-ruas jalan.

2.7.4 Angkutan Penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan Bastiong yang melayani lintasan penyeberangan Ternate – Sidangoli, Sofifi, Tidore, Batang Dua, Bitung dan Bacan memiliki potensi yang sangat strategis. Prasarana pelabuhan Penyeberangan Bastiong Ternate kondisi yang ada saat ini tidak mampu mendukung permintaan angkutan penyeberangan tersebut, karena terdapat kendala seperti areal fasilitas darat terbatas sehingga sulit dikembangkan.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh PT (Persero) ASDP, bahwa dengan beroperasinya Pelabuhan Penyeberangan Bastiong. Peningkatan permintaan ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas pegawai Provinsi dari dan ke Sofifi.

Potensi kawasan tersebut perlu ditingkatkan menjadi suatu kawasan terpadu yang strategis, karena hampir semua sektor-sektor ekonomi ada di kawasan ini. Oleh karena itulah, maka pembangunan Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut perlu dioptimalkan pada kawasan strategis, karena hal ini sebagai pemicu pertumbuhan kawasan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah Kota Ternate.

2.7.5 Angkutan Laut

Pelabuhan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang perdagangan antar daerah. Pelabuhan yang melayani angkutan dari dan ke Kota Ternate adalah Pelabuhan Dufa-dufa, Pelabuhan Ahmad Yani, Pelabuhan Semut dan Pelabuhan Bastiong terutama untuk pelayaran rakyat. Selain itu, terdapat pelabuhan khusus untuk melayani angkutan Perikanan dan Pertamina.

Sama halnya dengan kondisi Pelabuhan Penyeberangan Bastiong Ternate, pelabuhan lainnya juga memiliki kendala-kendala teknis yang sama.

2.7.6 Angkutan Udara

Bandara Babullah Ternate telah melayani penerbangan domestik langsung dari dan ke beberapa kota di Indonesia. Sistem rute penerbangan jarak pendek lokal dan regional yang menghubungkan Kota Ternate dengan Kabupaten lainnya di Maluku Utara dan kota-kota lainnya di Indonesia perlu dikembangkan. Hingga saat ini terdapat 7 perusahaan penerbangan yang beroperasi di Bandara Babullah, yaitu : Garuda Indonesia, Merpati, Lion-Wings Air, Batavia Air, Sriwijaya Air, Express Air dan Trigana Air.

2.7.7 Komunikasi dan Telekomunikasi

Sejauh ini jasa layanan aplikasi telematika belum mampu meningkatkan penyelenggara jasa pelayanan teknologi informasi yang dapat berfungsi sebagai pusat penyebaran informasi potensi daerah. Demikian juga halnya dengan sarana komunikasi dan diseminasi informasi belum dalam rangka pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah dengan kemitraan media untuk meningkatkan diseminasi informasi dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.7.8 Prasarana Dasar Permukiman

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Ternate mencapai 54,98%. Berdasarkan data statistik air minum Kota Ternate 2009, pelanggan rumah tangga merupakan pengguna air PAM yang terbesar jumlahnya mencapai 89,88% dari pelanggan lainnya. Sistem penyediaan air minum terpasang di perkotaan sebesar

326 l/det yang berarti mampu melayani 107.231 jiwa, namun jumlah penduduk yang terlayani baru mencapai 99.264 jiwa. Hal ini dapat diartikan juga bahwa sistem yang tersedia mampu melayani 66,31% penduduk Kota Ternate, namun yang terpakai baru 59,39% sehingga masih terdapat sisa kemampuan pelayanan sebesar 6,92%. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh Kota Ternate dalam pemenuhan kebutuhan air bersih antara lain melaksanakan Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dengan upaya peningkatan pelayanan berupa penambahan kapasitas sumber, jaringan pipa distribusi, sambungan rumah, terminal air, hidran umum serta peralatan dan bangunan pelengkap lainnya.

Untuk prasarana persampahan, tercatat volume sampah yang diproduksi tahun 2005 sebesar 136.875 m³ dan baru diolah secara memadai sebesar 78.110 m³. Secara fenomenal, Dinas Kebersihan menunjukkan kinerjanya secara maksimal sepanjang tahun 2006-2008 dengan volume sampah 139.065 m³ (tahun 2006), 144.175 m³ (tahun 2007), 155.490 m³ (tahun 2008) dan 159.870 (tahun 2009), yang rata-rata sebesar 86.943 m³ tiap tahun. Tingkat pelayanan persampahan yang dilakukan Dinas Kebersihan mencapai 78,43% (tahun 2005), 80,24% (tahun 2006), 81,77% (tahun 2007), 82,00% (tahun 2008) dan 82,02% (tahun 2009). Hal ini terkait juga dengan perkembangan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat, perkembangan ini dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah areal lahan terbuka yang pada gilirannya akan membawa akibat pada lingkungan baik yang positif maupun yang negatif. Untuk yang berpengaruh positif tentu akan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, namun perlu diantisipasi pengaruh negatif yang akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di perkotaan secara keseluruhan akibat perencanaan yang kurang baik dan adanya tingkat urbanisasi yang tinggi ataupun perkembangan alamiah.

2.7.9 Energi Listrik

Ketersediaan energi listrik di Kota Ternate disalurkan melalui Jaringan Distribusi 20 kV. Hingga akhir tahun 2009, beban puncak di Kota Ternate adalah sebesar 14 MW, penjualan tenaga listrik di Kota Ternate hingga akhir 2009 adalah sebesar 82,42 GWh dengan komposisi penjualan per sektor pelanggan untuk Sosial adalah 2,49 GWh (3,02 persen), Rumah Tangga 46,39 GWh (56,28 persen), Bisnis 20,53 GWh (24,91 persen), Industri 1,55 GWh (1,88 persen), dan Publik 11,47 GWh (13,91 persen). Beberapa

sektor jasa dan industri atau perusahaan memiliki pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Secara makro, kelistrikan di Kota Ternate masih dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) yang pemakaiannya masih didominasi oleh pelanggan rumah tangga.

Sementara, rasio elektrifikasi di Kota Ternate baru mencapai 63,11 persen. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah memperluas jaringan layanan listrik di seluruh Kota Ternate dan meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik terutama dalam mendorong perekonomian masyarakat dengan tumbuhnya sentra-sentra industri. Penyediaan tenaga listrik termasuk pembangunan dan pengoperasian pembangkit serta sistem transmisi, pengelolaan sistem distribusi, dan pelayanan pelanggan.

2.8. Perkembangan Pertanian

2.8.1 Ketahanan Pangan

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangan, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan yang mempunyai nilai sangat strategis dalam pembangunan antara lain: (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak yang paling asasi bagi manusia, (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penentu yang penting bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi, daerah dan nasional yang berkelanjutan, maka pembangunan Ketahanan Pangan selain diarahkan pada pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap rumah tangga juga bagaimana melakukan pengelolaan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

2.8.2 Pertanian Tanaman Pangan

Jenis komoditi tanaman bahan makanan yang banyak diusahakan petani di daerah ini adalah ubi kayu, jagung dan kacang tanah.

Selama kurun waktu tahun 2009, luas panen, produksi dan produktivitas dari beberapa komoditi tersebut diatas tercatat : Jagung luas panennya 81,68 ha dengan jumlah produksi sekitar 181,09 ton dan produktivitas 7,79 ton/ha; ubi kayu luas panen 375,6 ha dengan jumlah produksi 1.512,23 ton dan produktivitas sekitar 15,28 ton/ha dan

kacang tanah memiliki luas lahan dan produksi adalah 32,04 ha, 10,06 ton dengan produktivitas sebesar 2,25 ton/ha.

Selain komoditi tanaman palawija, petani di Kota Ternate mengusahakan tanaman hortikultura berupa sayuran dan buah-buahan. Dalam tahun 2009, produksi tanaman sayuran tercatat antara lain ketimun 151,1 ton, terung 96,71 ton dan kangkung 35,97 ton. Sementara produksi buah-buahan dalam tahun yang sama adalah sebagai berikut, pisang sebesar 778,29 ton, nenas 28,99 ton dan alpukat 35,58 ton. Lebih jelas mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel 2.53.

Tabel 2.53
Produksi dan Luas Panen Tanaman Pangan dan Holtikultura
Tahun 2007-2009

No	Jenis	Satuan	Tahun		
			2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
TANAMAN PANGAN					
1	Jagung	Luas (Ha)	67,20	112,21	81,68
		Produksi (Ton)	71,97	184,60	181,09
2	Kacang Tanah	Luas (Ha)	25,52	27,77	32,04
		Produksi (Ton)	7,93	9,01	10,6
3	Ubi Kayu	Luas (Ha)	321,90	356,16	375,6
		Produksi (Ton)	1.308,72	1.439,58	1.512,23
4	Ubi Jalar	Luas (Ha)	22,88	25,18	27,06
		Produksi (Ton)	40,85	47,83	51,71
TANAMAN HOLTIKULTURA					
1	Alpukat	Produksi (Ton)	32,22	33,53	35,58
2	Nanas	Produksi (Ton)	26,98	27,57	28,99
3	Pisang	Produksi (Ton)	661,45	740,14	778,29
4	Terung	Produksi (Ton)	79,94	87,91	96,71
5	Ketimun	Produksi (Ton)	124,89	137,36	151,10
6	Kangkung	Produksi (Ton)	21,21	23,98	35,97

2.8.3 Perkebunan

Luas tanaman menghasilkan, jumlah produksi dan produktivitas beberapa komoditi tanaman perkebunan di Kota Ternate pada tahun 2009 antara lain adalah : Cengkih luas tanaman menghasilkan 1.378 ha, produksi 488 ton dengan produktivitas 2,82 ton/ha ; Kelapa luas tanaman menghasilkan 1.737 ha, produksi sekitar 1.210 ton dengan produktivitas 1,43 ton/ha; pala luas tanaman menghasilkan 607 ha, produksinya mencapai 1.077 ton dan produktivitasnya sebesar 0,56 ton/ha.

2.8.4 Perikanan dan Kelautan

Jenis-jenis ikan yang produksinya cukup tinggi di wilayah Kota Ternate antara lain tuna/cakalang, layang/selar, tongkol serta kakap/kerapu. Produksi jenis-jenis ikan tersebut di daerah ini sepanjang tahun 2009 adalah : tuna/cakalang 447.151 ton, tongkol 116.188 ton, layang/selar 42.208 ton serta kakap/kerapu mencapai 19.474 ton. Perkembangan produksi hasil perikanan, jenis motor laut yang digunakan serta jenis alat tangkap yang digunakan.

2.8.5 Peternakan

Meskipun dengan tingkat produksi yang relatif rendah dibanding tingkat kebutuhan masyarakat, namun masih cukup banyak pula petani yang mengusahakan ternak. Rumah tangga petani ternak di daerah ini lebih banyak mengusahakan jenis ternak seperti sapi dan kambing serta unggas berupa ayam buras. Hingga tahun 2009, populasi jenis ternak dan unggas di Kota Ternate tercatat : sapi 1.606 ekor, kambing 13.764 ekor dan unggas 156.820 ekor.

2.8.6 Kehutanan

Luas kawasan non budidaya hutan lindung di Kota Ternate berdasarkan data Ternate Dalam Angka Tahun 2009 adalah 2.221 ha. Dalam perkembangannya luas kawasan hutan tersebut saat ini telah banyak mengalami perubahan.

2.9. Pemerintahan Umum

1) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Ternate tidak dapat dipisahkan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tersebut meliputi dokumen pelayanan kependudukan seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).

Adapun jumlah penduduk yang mengurus dokumen kependudukan di Kota Ternate pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.54 berikut :

Tabel 2.54
Jumlah Penduduk yang Mengurus Dokumen Kependudukan Menurut Jenis di Berbagai Kecamatan Tahun 2010

No	Kecamatan	Akte Catatan Sipil					
		Kelahiran	Perkawinan	Perceraian	Kematian	KTP	KK
1	Ternate Selatan	1.704	5 Psng	-	151	10.274	12.574
2	Ternate	1.528	8 Psng	-	108	7.911	
3	Ternate Utara	1.173	1 Psng	-	129	7.796	8.052
4	Pulau Ternate	320	1 Psng	-	63	2.571	3.130
5	Moti	51	-	-	6	427	860
6	Batang Dua	42	4 Psng	-	4	269	613
7	Hiri	31	-	-	5	352	612
Jumlah		4.849	19 Psng	-	466	29.600	36.229

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2010

2) Keluarga Berencana

Jumlah permintaan masyarakat terhadap keikutsertaan dalam berkeluarga berencana di Kota Ternate menunjukkan angka yang cukup besar, Peserta KB aktif pada tahun 2010 mencapai sebanyak 25.735 akseptor atau sekitar 72% dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 35.651 orang sehingga dapat diketahui pula jumlah PUS yang belum berkeluarga berencana cukup besar yaitu sebesar 9.916 ditambah dengan PUS yang baru.

Untuk melihat Komposisi klinik KB dan PPKBD di Kota Ternate disajikan pada tabel 2.55 berikut :

Tabel 2.55
Data Jumlah Klinik KB dan PPKBD di Kota Ternate Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah					
		Klinik	PPKBD	Sub. PPKBD	KLPK BKB	KLPK UPPKS	KLPK
1	Ternate Selatan	3	17	55	17	40	17
2	Ternate Utara	3	14	40	14	39	14
3	Ternate Tengah	5	15	36	15	46	15
4	Pulau Ternate	1	13	31	13	11	13
5	Moti	1	6	23	6	-	6
6	Batang Dua	2	6	12	6	-	6
7	Hiri	-	6	12	6	3	6
Jumlah		15	77	209	77	141	77

Sumber :Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, 2010

Jumlah Permintaan Akseptor Aktif maupun akseptor Baru KB di Kota Ternate pada tahun 2010 disajikan pada tabel 2.56 berikut :

Tabel 2.56
Jumlah Akseptor Aktif dan Akseptor Baru Menurut Metode yang Digunakan di Kota Ternate Tahun 2010

Kecamatan	Akseptor Aktif							Akseptor Baru						
	Metode Jangka Panjang			Non Metode Jangka Panjang				Metode Jangka Panjang			Non Metode Jangka Panjang			
	IUD	IMP	MOW	Suntikan	Pil	Kondom	MOP	IUD	IMP	MOW	Suntikan	Pil	Kondom	MOP
Ternate Selatan	19	70	80	426	118	22	32	262	1.076	411	3.975	2.417	245	253
Ternate Tengah	11	163	32	494	515	52	29	262	1.288	266	1.807	1.560	875	283
Ternate Utara	95	290	18	809	252	112	38	100	527	186	4.496	2.185	122	146
Pulau Ternate	-	42	-	170	44	5	20	15	226	16	1.000	392	10	25
Moti	-	8	-	216	115	3	-	-	36	-	376	199	-	-
Batang Dua	-	-	-	17	14	3	2	-	45	-	231	86	3	2
Hiri	-	-	-	56	17	-	-	3	70	-	213	29	16	-
Jumlah	125	573	130	2.188	1.075	197	121	642	3.268	879	12.098	6.868	1.271	709

Sumber : Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, 2010

Kecenderungan meningkatnya angka prevalensi (penggunaan alat dan obat kontrasepsi) merupakan hasil dari peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta ketersediaan alat kontrasepsi. Dengan demikian angka prevalensi perlu terus ditingkatkan agar angka kelahiran terkendali sehingga dapat mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang. Oleh karena itu peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, dan penyediaan alat kontrasepsi menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat kelahiran.

3) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Dalam rangka mendukung kelengkapan sarana dan prasarana permukiman dan prasarana dasar untuk menunjang pengembangan kesejahteraan dan perekonomian daerah maka diperlukan dukungan fasilitas umum yang terkait dengan kegiatan rekreasi, sarana olahraga, sarana ibadah dan fasilitas umum lainnya.

Adapun yang terkait dengan fasilitas sosial adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung sosial seperti pemakaman umum, panti asuhan, dan berbagai lembaga yang bergerak dibidang sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kenyataan yang terjadi di Kota Ternate bahwa keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial belum memenuhi/memadai sebagaimana yang dipersyaratkan. Keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial seharusnya menjadi persyaratan utama bagi kawasan permukiman atau perumahan baik yang dibangun oleh Pemerintah maupun swasta. Hal ini perlu untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitas umum dan fasilitas sosial secara ideal sebagaimana yang dipersyaratkan.

4) Perizinan

Kegiatan perizinan adalah sangat ditentukan oleh sejauh mana kegiatan investasi terjadi di Kota Ternate. Aspek perizinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan investasi di daerah ini. Prosedur perizinan yang efektif dan efisien tentunya harus dibarengi dengan standar pelayanan prima berdasarkan prinsip cepat, murah dan sederhana. Dengan demikian dapat memberikan kemudahan yang pada gilirannya akan menumbuhkan iklim dunia usaha yang semakin kondusif.

Oleh karena itu manajemen pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota saat ini melalui pelayanan satu atap, sehingga diharapkan mempermudah proses penyelesaian pengajuan perizinan sesuai standar pelayanan prima.

5) Pasar Modern dan Tradisional

Peran pasar modern dan pasar tradisional dalam suatu daerah merupakan infrastruktur yang sangat vital dalam rangka mendorong percepatan laju ekonomi di daerah tersebut. Kota Ternate hanya mempunyai 1 pasar modern dan 2 pasar tradisional. Saat ini pembangunan sarana dan prasarana jasa dan perdagangan pada kawasan pasar Gamalama yang cukup modern dan representatif sedang dilaksanakan. Namun demikian dinamika pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan lebih terkonsentrasi pada kawasan tertentu sehingga menimbulkan kesemrawutan kota. Oleh karena itu ke depan diperlukan pengembangan kawasan sentra-sentra ekonomi baru yang merata diberbagai kawasan sehingga tercapai keseimbangan pertumbuhan antar kawasan.

6) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rata-rata tingkat kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketentraman dan ketertiban umum di suatu daerah. Makin rendah angka kejahatan atau pelanggaran yang terjadi maka akan tercipta ketentraman dan ketertiban umum. Keadaan ini sangat didukung oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

7) Perusahaan Daerah Air Minum

Kehadiran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bagi suatu daerah merupakan sebuah kebutuhan yang tak dapat terelakkan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan komersial lainnya. Kebutuhan air bersih masyarakat sebagian besar dipenuhi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate yang melayani masyarakat sebagai konsumen di Kota Ternate. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun, maka kebutuhan air bersih yang disalurkan oleh PDAM juga semakin meningkat. Selama tahun 2009 suplai air bersih oleh PDAM tercatat sebanyak 5.367.331m³. Volume air bersih sebesar itu disalurkan kepada

16.544 pelanggan aktif. Berarti terjadi peningkatan sebanyak 907 pelanggan atau 5,8% dibanding tahun lalu.

8) Pelayanan Administrasi Kelurahan dan Kecamatan

Perkembangan arah pembinaan Pemerintahan Kelurahan yang telah dilakukan selama ini dalam rangka pemberdayaan otonomi desa terbagi dalam beberapa periode. Pada periode tahun 1999-2000 kebijakan lebih diarahkan pada kegiatan pembinaan rutin administrasi pemerintahan kelurahan. Periode tahun 2001, program pembinaan pemerintahan desa ditingkatkan melalui kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Perda Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Perda Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut Perda Nomor 32 dan 33 Tahun 2001, Pemerintah Kota Ternate melakukan pembinaan dan operasionalisasi perangkat pemerintah di kelurahan dengan melakukan pengisian formasi jabatan dan rekrutmen aparat masing-masing kelurahan yang dibentuk dalam wilayah, hal ini sangat penting mengingat dari segi perencanaan tata ruang wilayah (RUTRW) dan pelayanan masyarakat dengan kondisi masyarakat transisional menuju masyarakat perkotaan.

Langkah strategis yang telah ditempuh dalam rangka pemberdayaan pemerintahan kelurahan dalam tahun 2004 adalah perampungan beberapa produk hukum antara lain perumusan Perda yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 :

1. Perda Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa-desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Ternate.
2. Perda Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi & tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kota Ternate.
3. Perda Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

9) Pelayanan Umum Pemerintahan

Upaya Pemerintah Kota Ternate dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan adalah dengan mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain dengan merancang SPM. Untuk tahap awal adalah menyusun SPM bidang pemerintahan umum, menerapkan secara terbatas SPM untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta penyampaian secara transparan prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian layanan bagi SKPD yang diberi kewenangan memberikan rekomendasi/perizinan.

2.10. Wilayah dan Tata ruang

Pada tatanan wilayah Kota Ternate fungsi **pelayanan primer** diemban oleh **Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan Ternate Selatan** yang dicirikan dengan ketersediaan fasilitas pelayanan terhadap seluruh wilayah pengembangannya terutama dalam konteks pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan fungsi **pelayanan sekunder** diemban oleh masing-masing **Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua** yang memiliki jangkauan pelayanan terhadap wilayah pengembangan pusat (*central*) ruang kota.

Adapun penetapan sistem pusat pelayanan kota Ternate direncanakan sebagai berikut:

1. Sistem pusat pelayanan kota dikembangkan dalam 1 (satu) pusat pelayanan kota, 4 (empat) sub pusat pelayanan kota, dan 26 (dua puluh enam) pusat lingkungan.
2. Masing-masing Sistem pusat pelayanan kota dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas keamanan dan keselamatan;
3. Pengembangan fasilitas pendidikan terdiri atas:
 - a. TK dan SD dengan jangkauan pelayanan lingkungan;
 - b. SLTP dengan jangkauan pelayanan BWK;
 - c. SLTA dengan jangkauan pelayanan kota; dan
 - d. Pendidikan/Perguruan Tinggi dengan jangkauan pelayanan kota dan regional.

4. Pengembangan fasilitas kesehatan terdiri atas:
 - a. Balai Pengobatan dan praktek dokter dengan jangkauan pelayanan lingkungan;
 - b. Puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotik dengan jangkauan pelayanan SPK; dan
 - c. Rumah sakit dengan jangkauan pelayanan kota dan regional.
5. Pengembangan fasilitas peribadatan menyebar ke seluruh Kota Ternate sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat disesuaikan dengan jangkauan pelayanan masing-masing jenis rumah ibadah serta jumlah dan sebaran pemeluknya.
6. Pengembangan fasilitas keamanan dan keselamatan terdiri atas :
 - a. Mengembangkan fasilitas pos polisi dengan jangkauan pelayanan setingkat lingkungan dan berlokasi di setiap pusat lingkungan;
 - b. Pemadam kebakaran berada dalam jangkauan pusat dan sub pelayanan setingkat kota dan berlokasi di Kota Ternate;
 - c. Rencana pengembangan pemadam kebakaran dibuat dalam hierarki di setiap kecamatan Kota Ternate;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dalam jangkauan pelayanan setingkat kota dan berlokasi di sementara Kecamatan Ternate Selatan.

2.11. SDA dan Lingkungan Hidup

Disadari, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup selama ini dilaksanakan belum efisien dan masih berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sehingga mengakibatkan terjadinya pengrusakan sumberdaya alam yang tak terkendali.

Arah pembangunan Kota Ternate tahun 2005-2025 memuat kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan.

Terwujudnya Kota Ternate yang bersih dan teduh (*clean and green*) yang ditandai dengan terbinanya kualitas lingkungan hidup di Kota Ternate secara berkelanjutan (*Sustainable*).

Terwujudnya Kota Ternate yang berkelanjutan (*sustainable*), yang di tandai dengan terjaganya pemanfaatan sumber daya alam yang terbaharukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab serta berdasarkan analisa kebutuhan yang akurat agar mampu memberi manfaat yang besar sehingga mampu menciptakan Kota Ternate yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan sandang bagi kesejahteraan hidup masyarakat dari generasi ke generasi.

Penanganan sampah yang memperhituskan kapasitas daya dukung lingkungan dan usaha daur ulang, terciptanya jalur hijau yang mampu menyerap emisi gas karbon secara maksimal. Terwujudnya Kota Ternate yang berwawasan lingkungan dengan terjaganya integritas ekosistem yang sesuai dengan jalur migrasi satwa liar endemik sehingga tercipta keberlangsungan kehidupan dan saling ketergantungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan.

2. Peningkatan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup

Terwujudnya kesadaran seluruh komponen masyarakat bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah urusan dan kepentingan bersama, sehingga tercipta sinergitas pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya-upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat terwujud melalui pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara adil dan bertanggung jawab.

3. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup

Terwujudnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan melalui upaya pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat, sehingga mampu berperilaku sadar lingkungan dan ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4. Pengendalian pencemaran dan perusakan komponen lingkungan hidup

Terbinanya hubungan hulu-hilir yang memungkinkan terkendalinya potensi banjir akibat perubahan fungsi hutan dan lahan serta upaya mitigasi bencana yang terpadu sesuai dengan alur topografi wilayah. Hal ini ditandai dengan terwujudnya kerjasama dengan Kota lain yang sejalur sehingga tercipta pembagian wewenang dan tanggung jawab yang adil bagi usaha-usaha untuk menciptakan keserasian hubungan hulu-hilir.

Terbinanya lingkungan pesisir, terjaga dari dampak banjir dan erosi serta dampak dari abrasi pantai, melalui usaha rehabilitasi dan penyadaran publik sehingga mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Adapun Strategi Pelaksanaan Program Bidang Lingkungan Hidup kedepan, meliputi :

- a. Penciptaan iklim yang sehat dan bebas polusi sehingga kehidupan warga kota dapat berjalan baik.
- b. Terciptanya suasana teduh yang nyaman, bersih dan indah.
- c. Sebagai lokasi cadangan keperluan sanitasi kota dan penyediaan ruang dalam kegiatan-kegiatan perkotaan tertentu.
- d. Pelestarian kearifan budaya lokal serta Potensi Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup.
- e. Mendorong masyarakat agar lebih konsen terhadap nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- f. Melakukan perlindungan terhadap cagar budaya alam sebagai asset Pemda Kota dalam rangka pengembangan jasa pariwisata.
- g. Membangun pemahaman masyarakat dibidang pelestarian sumberdaya alam dan nilai-nilai budaya.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TERNATE 2005-2025

3.1. Visi Kota Ternate

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi serta dengan mempertimbangkan modal dasar daerah yang dimiliki dalam 20 tahun mendatang, maka Visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Ternate tahun 2005-2025 adalah :

***“KOTA TERNATE MANDIRI, MAJU, ADIL DAN
SEJAHTERA BERBASIS KEPULAUAN”***

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Ternate tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kota Ternate. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian kota yang bercirikan kepulauan, yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Supaya terbangun persamaan interpretasi terhadap pernyataan visi tersebut, sehingga diperlukan penjelasan makna pernyataan Visi. Penjelasan masing-masing pernyataan Visi Kota Ternate adalah sebagai berikut:

Ternate, Kota Ternate dapat diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum beserta semua potensi yang dimiliki dan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mandiri, Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan memengaruhinya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, politik, maupun sosial budaya. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif yang tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah; untuk membangun pemerintah daerah yang mandiri mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

Maju, Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik pada bidang ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya, politik, pertahanan dan keamanan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi sumber dayanya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas dengan Kota lain.

Adil, dapat diartikan tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya tidak sewenang-wenang atau dengan definisi lain terkait dengan keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa dikurangi dan dilebihkan. Prinsip-prinsip keadilan berkaitan dengan akses kepada pengambilan keputusan dan '*basis necessities*' (kebutuhan dasar) kehidupan. Pria dan wanita memiliki akses yang sama dalam perlindungan dan konsistensi perlindungan hukum, partisipasi pengambilan keputusan, penetapan prioritas dan proses alokasi sumber daya. Supaya tercipta keadilan bagi masyarakat Kota Ternate, diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada semua baik yang miskin atau kaya, remaja atau lanjut usia (lansia), kelompok minoritas, cacat, dengan akses yang sama terhadap penyediaan nutrisi, pendidikan, kesempatan kerja, perawatan kesehatan, perumahan, penyediaan air bersih, sanitasi dan lain-lain pelayanan dasar.

Sejahtera, Sejahtera dapat ditunjukkan dengan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yakni masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materil) maupun sosial (spiritual). Dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat Kota Ternate telah dapat terpenuhi secara lahir dan batin dengan prinsip adil dan merata. Beberapa indikasi kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Ternate adalah dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; menurunnya tingkat kemiskinan; menurunnya tingkat pengangguran; meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat; meningkatnya kualitas hidup sumber daya manusia yang ditandai dengan terpenihinya hak social masyarakat yang mencakup pelayanan dasar; sehingga secara keseluruhan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berbasis Kepulauan, terdiri dari beberapa pulau yang saling terkoneksi satu sama lainnya serta saling melengkapi dalam rangka mendukung pencapaian Kota Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera. Dengan basis kepulauan maka segala aspek perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan harus didasarkan atas pertimbangan pembangunan berbasis pulau.

3.2. Misi Kota Ternate

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender Serta Aparatur Pemerintah yang Profesional.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota Budaya, Kota Maritim dan Sejarah.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas.
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah yang Maju dalam bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kelautan berbasis kepulauan.
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari.

BAB IV

SASARAN POKOK, ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TERNATE 2005 - 2025

4.1. Sasaran Pokok Pembangunan

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Ternate tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Kota Ternate yang mandiri berbasis kepulauan sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kota Ternate yang mandiri berbasis kepulauan, pembangunan daerah dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- A. **Misi 1** : Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Aparatur Pemerintah yang Profesional, **dengan sasaran pokok** :
1. Meningkatnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang diukur dengan peningkatan indeks demokrasi setiap lima tahun, birokrasi yang profesional dan netral dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap Pemilu.
 2. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah.
 3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
 4. Meningkatnya upaya untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat.

5. Meningkatnya upaya perlindungan HAM yang ditandai dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (GDI).
 7. Menurunnya jumlah tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
 8. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah yang ditandai dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
 9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang ditandai dengan terciptanya kepuasan masyarakat.
- B. **Misi 2** : Mewujudkan Pembangunan Kota Budaya, Kota Maritim dan Sejarah dengan sasaran pokok :
1. Terbangunnya sistem pembangunan Kota Budaya.
 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai luhur budaya Kota Ternate.
 3. Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang berdasarkan pada kearifan lokal dan jati diri.
 4. Meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat.
- C. **Misi 3** : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas, dengan sasaran pokok :
1. Meningkatnya kualitas SDM berbasis potensi lokal, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (GDI).
 2. Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, yang ditandai dengan tidak adanya angka putus sekolah dan tidak adanya angka buta aksara 20 tahun yang akan datang.
 3. Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan yang ditandai dengan semakin meningkatnya rata-rata lama hidup Kota Ternate 20 tahun yang datang.

4. Meningkatkan kualitas kelembagaan kepemudaan.
 5. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, yang ditandai dengan tidak adanya pengangguran 20 tahun yang akan datang.
 6. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin, yang ditandai dengan menurunnya penduduk miskin secara signifikan setiap lima tahun.
 7. Meningkatkan dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, yang ditandai dengan semakin banyaknya inovasi teknologi.
- D. **Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah yang Maju dalam Bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kelautan yang berbasis kepulauan, dengan sasaran pokok :**
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas manajemen dan pembangunan infrastruktur.
 2. Meningkatkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, pariwisata dan kelautan, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu.
 3. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat.
 4. Melakukan perencanaan dan pengembangan investasi pada kawasan kota baru, di bidang infrastruktur, jasa, perdagangan dan pariwisata serta untuk mendukung kawasan tersebut untuk menjadi pusat pendidikan berbasis lingkungan.
- E. **Misi 5 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari, dengan sasaran pokok :**

1. Terlaksananya penataan ruang dengan baik.
2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang yang mendukung pembangunan perdagangan, pariwisata dan kelautan.
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.

4.2. Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Ternate dalam mencapai tingkat kemandirian berbasis kepulauan yang diinginkan, kebijakan pembangunan daerah jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang adalah sebagai berikut.

- A. **Misi 1** : Mewujudkan Kehidupan Politik yang Berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Aparatur Pemerintah yang Profesional :
1. Pembentukan kemandirian dan kesadaran masyarakat dalam berperanserta dalam kehidupan politik.
 2. Penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata partai politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan.
 3. Peningkatan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki.
 4. Penegakan hukum oleh aparat dengan meningkatkan profesionalisme aparat hukum daerah.
 5. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban Kota Ternate dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, kondisi penduduk, dan kondisi sosial masyarakat Kota Ternate.

6. Peningkatan usaha memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan.
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan, untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat.
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat.
9. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM.
10. Pengembangan sistem pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada memperkuat kelembagaan, pangarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga keadilan gender terjamin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik untuk memberikan lebih besar peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
11. Pelaksanaan reformasi birokrasi.
12. Pemberdayaan aparatur pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggungjawab.
13. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan pemanfaatan yang efektif dengan memanfaatkan sistem pengelolaan anggaran berbasis komputer.
14. Identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dalam rangka mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis partisipasi masyarakat.

15. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen di masing-masing Satuan Kerja yang akan diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet.

B. Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota Budaya:

1. Merevitalisasikan keluhuran khasanah budaya dengan keberagaman masyarakat Ternate.
2. Sistem pembangunan Kota budaya yang diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur, dan ditujukan untuk membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai budaya, dimana Kota Ternate termasuk salah satu Kota Budaya di Indonesia.
4. Pemanfaatan kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat.
5. Peningkatan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antarkelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

C. Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas :

1. Peningkatan, pemerataan dan pengurangan kesenjangan yang terjadi antar wilayah, kelompok usia dan jenis kelamin serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan. Peningkatan kemampuan

- akademis, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan standar nasional pendidikan dan pencapaian sekolah standar nasional bertaraf internasional.
 3. Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis pendidikan untuk semua.
 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan, dan mutu terhadap pelayanan kesehatan baik aspek promosi, pencegahan, dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
 5. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
 6. Penciptaan dan Pengembangan budaya berolah raga bagi masyarakat, agar terwujud kehidupan yang sehat di samping mengembangkan secara simultan olah raga prestasi melalui pengembangan sarana prasarana olah raga yang memadai.
 7. Pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertakwa, mandiri, inovatif, dan kreatif, serta peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subjek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
 8. Peningkatan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan dan pemerataan balai-balai latihan kerja daerah.
 9. Mendorong penciptaan lapangan kerja disegala bidang dengan membuka kesempatan untuk berinvestasi yang lebih muda.
 10. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (*entrepreneur*) sehingga mampu bersaing di era global.

11. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui dua cara. Pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin. Kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Kedua cara dimaksud pada dasarnya adalah memenuhi hak-hak masyarakat miskin selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) dan MDGs meliputi: a) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin (pangan, sandang, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, kepemilikan); b) Peningkatan pendapatan; c) Peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan; d) Perlindungan sosial dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, konflik, diskriminasi serta kerentanan lainnya seperti bencana; d) Perbaikan lingkungan hidup (sanitasi dan air bersih).
 12. Pengembangan sistem pembangunan sosial sesuai dengan komitmen *Global Millennium Development Goals* sebagai langkah menuju upaya penghapusan kemiskinan, dengan target pengurangan setengah angka kemiskinan pada tahun 2015 yang telah dicanangkan PBB.
 13. Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri berdasarkan potensi perdagangan, pariwisata dan kelautan.
 14. Pengembangan pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pencari kerja sesuai perkembangan IPTEK.
- D. **Misi 4** : Mewujudkan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah yang Maju pada bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kelautan berbasis kepulauan :
1. Revitalisasi manajemen dan infrastruktur perdagangan, pariwisata dan kelautan.
 2. Pengembangan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan untuk meningkatkan akses dan pelayanan listrik dan ketersediaan untuk kecukupan energi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
 3. Pengembangan sarana prasarana infrastruktur jalan.
 4. Meningkatkan dan memperluas infrastruktur perekonomian yang esensial (pasar, terminal dan dermaga).

5. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pariwisata dan kelautan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah.
6. Pengembangan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan nondiskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat, serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM), sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi Kota Ternate.
7. Peningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan dan nelayan, dengan tetap menjaga kelestarian habitat ikan melalui penghijauan hutan bakau, pelestarian terumbu karang, dan pelarangan menggunakan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan.
8. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi daerah serta mendorong timbulnya daya saing antar produk pariwisata. Pengembangan kepariwisataan juga dapat memasyarakatkan keragaman budaya, alam dan keunikan lokal Kota Ternate.
9. Penciptaan UKM berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerja sama strategis dan sinergis antarpelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
10. Peningkatan investasi di daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah karena meningkatnya kapasitas dan aktivitas perekonomian daerah. Pengembangan investasi dilakukan dengan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian berusaha, dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.

11. Tersusunnya instrumen jaminan pangan bagi masyarakat.
 12. Pelaksanaan instrument jaminan pangan secara berkelanjutan.
 13. Implementasi pengembangan kawasan kota baru sesuai dokumen perencanaan.
- E. **Misi 5** : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari :
1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.
 2. Pengembangan sistem pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem, dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memerhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*).
 3. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, dapat menciptakan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup, yang utamanya diarahkan pada generasi muda.

4.3. Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mengemban pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah, dirumuskanlah agenda pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dengan berdasarkan atau mengacu pada substansi misi pembangunan jangka panjang daerah. Setiap agenda pembangunan jangka panjang daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Substansi visi, misi, agenda, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Ternate Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Mengingat akan pentingnya hal di atas, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan maka kesinambungan pembangunan selama 20 tahun ditetapkan tahapan 5 tahunan yaitu Lima Tahun Pertama **MENATA**, Lima Tahun Kedua **MENGEMBANGKAN**, Lima Tahun Ketiga **MEMPERKOKOH**, Lima Tahun Keempat **TERCAPAI (3M1T)**.

Setiap sasaran pokok dalam lima misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar itu, tahapan dan skala prioritas utama disusun sebagai berikut.

4.3.1 RPJMD I (2005 – 2010)

A. Tema

Tahun 2005-2010: “**MENATA** Kota Ternate menuju kota yang Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera pada bidang Budaya, Perdagangan, Pariwisata dan Maritim berbasis Kepulauan”.

B. Skala Prioritas Pembangunan

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap sebelumnya, RPJMD ke-1 diarahkan pada prioritas **Kota Ternate sebagai Kota Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera pada Bidang Budaya Menuju Masyarakat Madani**.

Dengan demikian **strategi pembangunan 5 tahun pertama** Kota Ternate adalah pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan diprioritaskan pada **PERWUJUDAN KOTA MANDIRI, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA BIDANG BUDAYA BERBASIS KEPULAUAN** dengan tetap didukung oleh :

- Perwujudan Kehidupan Politik Yang Berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender Serta Aparatur Pemerintah yang Profesionalis.
- Perwujudan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas.
- Perwujudan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah yang Maju Berbasis Pada Perdagangan, Pariwisata dan Kelautan.
- Perwujudan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari.

Sasaran dan Kebijakan Umum pembangunan pada RJMD ke-1 adalah :

Misi	Sasaran Pokok	Kebijakan Umum
1. Mewujudkan kehidupan politik yang berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta aparat pemerintah yang profesionalis.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang diukur dengan peningkatan indeks demokrasi setiap lima tahun, birokrasi yang profesional dan netral dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap Pemilu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kemandirian dan kesadaran masyarakat dalam berperanserta dalam kehidupan politik. • Penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata partai politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas produk hukum daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki.

Misi	Sasaran Pokok	Kebijakan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum oleh aparat dengan meningkatkan profesionalisme aparat hukum daerah. • Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban Kota Ternate dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, kondisi penduduk, dan kondisi sosial masyarakat Kota Ternate. • Peningkatan usaha memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya upaya untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan, untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat • Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya

Misi	Sasaran Pokok	Kebijakan Umum
		<p>keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya upaya perlindungan HAM yang ditandai dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM.
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (GDI). • Menurunnya jumlah tindak kekerasan berbasis gender dan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada memperkuat kelembagaan, pangarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga keadilan gender terjamin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik untuk memberikan lebih besar peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah yang ditandai dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan reformasi birokrasi. • Pemberdayaan aparatur pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggungjawab.

Misi	Sasaran Pokok	Kebijakan Umum
	<p>bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan pemanfaatan yang efektif dengan memanfaatkan sistem pengelolaan anggaran berbasis komputer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang ditandai dengan terciptanya kepuasan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dalam rangka mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis partisipasi masyarakat. • Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen di masing-masing Satuan Kerja yang akan diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet.
<p>2. Mewujudkan Pembangunan Kota Budaya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya sistem pembangunan Kota Budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merevitalisasikan keluhuran khasanah budaya dengan keberagaman masyarakat Ternate. • Sistem pembangunan Kota budaya yang diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur, dan ditujukan untuk membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai luhur budaya Kota Ternate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai budaya, dimana Kota Ternate termasuk salah satu Kota Budaya di Indonesia.

Misi	Sasaran Pokok	Kebijakan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat.
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antarkelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.
<p>3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas SDM berbasis potensi lokal, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan, pemerataan dan pengurangan kesenjangan yang terjadi antar wilayah, kelompok usia dan jenis kelamin serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan. Peningkatan kemampuan akademis, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru.

Misi	Sasaran Pokok	Kebijakan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, yang ditandai dengan tidak adanya angka putus sekolah dan tidak adanya angka buta aksara 20 tahun yang akan datang. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan standar nasional pendidikan dan pencapaian sekolah standar nasional bertaraf internasional. Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis pendidikan untuk semua.
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan yang ditandai dengan semakin meningkatnya rata-rata lama hidup Kota Ternate 20 tahun yang datang. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan, dan mutu terhadap pelayanan kesehatan baik aspek promosi, pencegahan, dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan. Penciptaan dan Pengembangan budaya berolah raga bagi masyarakat, agar terwujud kehidupan yang sehat di samping mengembangkan secara simultan olah raga prestasi melalui pengembangan sarana prasarana olah raga yang memadai.
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas kelembagaan kepemudaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertakwa, mandiri, inovatif, dan kreatif, serta peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subjek

Misi	Sasaran Pokok	Kebijakan Umum
		<p>pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, yang ditandai dengan tidak adanya pengangguran 20 tahun yang akan datang 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan dan pemerataan balai-balai latihan kerja daerah. • Mendorong penciptaan lapangan kerja disegala bidang dengan membuka kesempatan untuk berinvestasi yang lebih muda. • Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (<i>entrepreneur</i>) sehingga mampu bersaing di era global.
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin, yang ditandai dengan menurunnya penduduk miskin secara signifikan setiap lima tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua cara dimaksud pada dasarnya adalah memenuhi hak-hak masyarakat miskin selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) dan MDGs meliputi: a) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin (pangan, sandang, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, kepemilikan); b) Peningkatan pendapatan; c) Peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan;

Misi	Sasaran Pokok	Kebijakan Umum
		<p>d) Perlindungan sosial dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, konflik, diskriminasi serta kerentanan lainnya seperti bencana; d) Perbaikan lingkungan hidup (sanitasi dan air bersih).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem pembangunan sosial sesuai dengan komitmen <i>Global Millennium Development Goals</i> sebagai langkah menuju upaya penghapusan kemiskinan, dengan target pengurangan setengah angka kemiskinan pada tahun 2015 yang telah dicanangkan PBB.
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, yang ditandai dengan semakin banyaknya inovasi teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri berdasarkan potensi perdagangan, pariwisata dan kelautan. • Pengembangan pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pencari kerja sesuai perkembangan IPTEK.
<p>4. Mewujudkan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah pada bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kelautan berbasis kepulauan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kuantitas dan kualitas manajemen dan pembangunan infrastruktur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi manajemen dan infrastruktur perdagangan, pariwisata dan kelautan. • Pengembangan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan untuk meningkatkan akses dan pelayanan listrik dan ketersediaan untuk kecukupan energi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. • Pengembangan sarana prasarana infrastruktur jalan.

Misi	Sasaran Pokok	Kebijakan Umum
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan memperluas infrastruktur perekonomian yang esensial (pasar, terminal dan dermaga).
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, pariwisata dan kelautan, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pariwisata dan kelautan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. • Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pariwisata dan kelautan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. • Pengembangan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan nondiskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat, serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM), sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi Kota Ternate. • Peningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan dan nelayan, dengan tetap menjaga kelestarian habitat ikan melalui penghijauan hutan bakau, pelestarian terumbu karang,

Misi	Sasaran Pokok	Kebijakan Umum
		<p>dan pelarangan menggunakan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi daerah serta mendorong timbulnya daya saing antar produk pariwisata. Pengembangan kepariwisataan juga dapat memasyarakatkan keragaman budaya, alam dan keunikan lokal Kota Ternate. • Penciptaan UKM berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerja sama strategis dan sinergis antarpelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. • Peningkatan investasi di daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah karena meningkatnya kapasitas dan aktivitas perekonomian daerah. Pengembangan investasi dilakukan dengan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian berusaha,

Misi	Sasaran Pokok	Kebijakan Umum
		<p>dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya instrumen jaminan pangan bagi masyarakat. • Pelaksanaan instrumen jaminan pangan secara berkelanjutan.
<p>5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penataan ruang dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang yang mendukung pembangunan perdagangan, pariwisata dan kelautan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem, dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memerhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (<i>renewable</i>).

Misi	Sasaran Pokok	Kebijakan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, dapat menciptakan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup, yang utamanya diarahkan pada generasi muda.

4.3.2 RPJMD II (2010 – 2015)

A. Tema

Tahun 2010-2015: : **MENGEMBANGKAN** Kota Ternate Menuju kota yang Agamis, Harmonis, Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera Pada Bidang Budaya, Perdagangan, Pariwisata dan Maritim berbasis Kepulauan yang Berwawasan Lingkungan (BAHARI BERKESAN)“.

B. Skala Prioritas Pembangunan

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap sebelumnya, RPJMD ke-2 diarahkan pada prioritas Kota Ternate Kota Agamis, Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera pada Bidang Perdagangan, Pariwisata dan Maritim berbasis Kepulauan yang Berwawasan Lingkungan (BAHARI BERKESAN)“.

Dengan demikian **strategi pembangunan 5 tahun kedua** Kota Ternate adalah pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan diprioritaskan pada **PERWUJUDAN KOTA AGAMIS, MANDIRI, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA PADA BIDANG PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN MARITIM BERBASIS KEPULAUAN yang BERWAWASAN LINGKUNGAN** dengan tetap didukung oleh :

- Perwujudan Ternate yang agamis.
- Perwujudan pemerataan Sarana dan Prasarana perekonomian yang lebih representatif.

- Perwujudan pembangunan Ternate sebagai kota pesisir berbasis lingkungan.
- Perwujudan pembangunan Ternate sebagai kota pariwisata berciri budaya dan bahari.
- Perwujudan pembangunan Ternate sebagai kota terbuka, demokratis dan adil.
- Perwujudan pembangunan Ternate yang sehat dan sejahtera.

Sasaran dan Kebijakan Umum pembangunan pada RJMD ke-2, sama dengan tabel diatas.

4.3.3 RPJMD III (2015 – 2020)

A. Tema

Tahun 2015-2020: : **MEMPERKOKOH** Kota Ternate Menuju Kota yang Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera Pada Bidang Budaya, Perdagangan, Pariwisata dan Maritim Berbasis Kepulauan”

B. Skala Prioritas Pembangunan

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap sebelumnya, RPJMD ke-3 diarahkan prioritas Kota Ternate dalam Melanjutkan Perwujudan Kota Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera pada Bidang Budaya, Perdagangan, Pariwisata dan Maritim Berbasis Kepulauan”.

Dengan demikian **strategi pembangunan 5 tahun ketiga** Kota Ternate adalah pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan diprioritaskan pada **PERWUJUDAN KOTA MANDIRI, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG OLEH PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN MARITIM BERBASIS KEPULAUAN** dengan tetap didukung oleh :

- Perwujudan Kehidupan Politik yang Berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender Serta Aparatur Pemerintah yang Profesionalis.
- Perwujudan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas.
- Perwujudan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari.

Sasaran dan Kebijakan Umum pembangunan pada RJMD ke-3, sama dengan tabel diatas.

4.3.4 RPJMD IV (2020 – 2025)

A. Tema

Tahun 2020-2025: : **TERCAPAINYA** Kota Ternate sebagai Kota Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera Pada Bidang Budaya, Perdagangan, Pariwisata dan Maritim berbasis Kepulauan”.

B. Skala Prioritas Pembangunan

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap sebelumnya, RPJMD ke-4 diarahkan pada tercapainya Kota Ternate yang mandiri, maju, adil dan sejahtera yang didukung budaya, perdagangan, pariwisata dan maritim berbasis kepulauan”.

Dengan demikian **strategi pembangunan 5 tahun keempat** Kota Ternate adalah pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan diprioritaskan pada pencapaian visi, misi dan sasaran pada RPJPD maupun RPJMD. Untuk pelaksanaan pembangunan yang telah tercapai pada RPJMD sebelumnya, tetap diperhatikan agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga.

Sasaran dan Kebijakan Umum pembangunan pada RJMD ke-4, sama dengan tabel diatas.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ternate Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Ternate selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

RPJPD ini juga menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi calon Walikota dan Wakil Walikota dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Ternate dalam mewujudkan visi

***“KOTA TERNATE MANDIRI, MAJU, ADIL DAN
SEJAHTERA BERBASIS KEPULAUAN”***

perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Ternate, serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah.

WALIKOTA TERNATE

H. BURHAN ABDURAHMAN



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2012**